



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 115 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH TAHUN 2022**

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ *MAJOR PROJECT*  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022**



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.1 -

**MATRIKS PROYEK PRIORITAS STRATEGIS/ MAJOR PROJECT  
PADA PRIORITAS NASIONAL RKP 2022**

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>PN 1: MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN</b>		
<b>1) MP : Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas <sup>2)</sup></b>	<b>6.418.615,9</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.389.785,9</b>	
<i>Aspek: Penerapan Industri 4.0</i>		
Fasilitasi Rencana Penanaman Modal di Bidang Industri Manufaktur	500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
<i>Aspek: Dorongan Promosi Ekspor</i>		
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	13.519,5	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Indonesia-Pacific Forum for Development	5.929,5	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	3.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Analisa dan Informasi Pasar Ekspor di Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	1.223,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Export Coaching Program</i>	6.328,7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Ekspor	1.600,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	3.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	3.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pameran Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur	2.174,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pameran ke Negara Mitra Dagang Mitra Utama	2.109,2	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pameran Trade Expo Indonesia	3.391,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi China International Import Expo-Shanghai	1.305,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi Expo 2020 Dubai	92.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi pada Forum terkait Produk Industri dan Pertambangan	1.089,6	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi Pameran CA Expo Nanning	1.339,9	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi Pameran Dalam Negeri	3.053,1	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Partisipasi Pameran Terintegrasi Lainnya	2.066,8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pendampingan Pengembangan Produk Ekspor, Jasa, dan Ekonomi Kreatif	2.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	10.986,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pengembangan Market Place Berorientasi Ekspor	1.251,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Penghargaan Primaniyarta untuk Eksporthir Indonesia	1.599,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<i>Pilot Project Export Center Surabaya</i>	2.700,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	1.481,7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra	1.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	2.829,7	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.2 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	10.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan	2.250,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri yang Terfasilitasi Melalui Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Program Nasional IMEI <i>Control</i>	10.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri yang Terfasilitasi Melalui Pembangunan Indonesia <i>Manufacturing Center (One Stop Solution Manufacture)</i>	50.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Industrial Intelligence</i> dan Peluang Kerja Sama Industri di Luar Negeri	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<i>Pilot Project Learning Factory 4.0</i>	52.408,9	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Promosi dan Temu Bisnis pada Pameran Berskala Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Promosi dan Temu Bisnis pada Pameran Berskala Internasional Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek: Fasilitas Usaha</b>		
Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	22.012,5	KEMENTERIAN KEUANGAN
<i>Be Creative District</i> (BCD) yang Dikembangkan	981,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Filantropi	4.818,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (1373 - Kota Sawahlunto)	24.133,5	PEMDA (DAK FISIK)
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (3517 - Kab. Jombang)	26.252,5	PEMDA (DAK FISIK)
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (3526 - Kab. Bangkalan)	36.095,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Peningkatan Inovasi Dan Penggunaan Teknologi</b>		
Hasil Pengembangan Alat dan Deteksi Kesehatan	5.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Hasil Pengembangan Teknologi Tepat Guna	4.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Teknologi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Berlisensi Indonesia	19.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Gudang Beku	15.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gudang Beku <i>Portable</i>	28.769,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Mobil Refrigasi (Berpendingin)	10.060,8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pabrik Es	30.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasar Ikan	9.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Peralatan Pengolahan Ikan	6.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Kebijakan Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional	1.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sentra Kuliner Ikan	9.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.3 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	1.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Layanan Data dan Publikasi	1.465,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pengembangan desain Melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	4.500,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Penghargaan <i>Good Design Award (GDI)</i>	2.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Industri Komponen yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan Struktur	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Elektronika yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Otomotif yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Melalui Pendampingan	6.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Investor yang Terfasilitasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Koordinasi Pemberian Insentif Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan <i>Apparel</i>	6.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Perbaikan Rantai Pasok di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Melalui Transformasi Industri 4.0	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Percepatan Pemanfaatan Hasil Litbang Teknologi Industri Melalui Program DAPATI	10.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Percepatan Pemanfaatan Transformasi Industri 4.0 Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Industri 4.0	4.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yang Dilakukan Pendampingan Penerapan <i>Industry 4.0</i>	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek: Peningkatan Investasi Teknologi Maju</b>		
Fasilitasi Investor dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Komersialisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam Negeri	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan dan Fasilitasi Peningkatan Ekspor Ditjen IKPT	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Penguatan Industri Ventilator Dalam Negeri	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek: Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha</b>		
UMKM yang Dibina dalam Inkubator Bisnis	3.230,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Aspek: Peningkatan Standar dan Kualitas Produk</b>		
Wirausaha Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, serta Fasilitasi Mesin/Peralatan	51.003,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.4 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Wirausaha Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan	51.253,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitas Mesin/Peralatan	50.994,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	6.533,5	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
RSNI3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 Sektor AKKH	1.098,0	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
Rekomendasi Kebijakan dari Hasil Pengolahan dan Analisis Data <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	1.480,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Fasilitas Sertifikasi Produk Ekspor	3.250,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitas Produksi Fitofarmaka	43.219,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	17.898,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	9.424,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	7.700,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	12.973,8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	5.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Neraca Komoditas Industri Sektor Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Neraca Komoditas Sektor Industri Logam	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Neraca Komoditas Sektor Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	9.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Neraca Komoditas Sektor Industri Otomotif	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pangan Fungsional yang Difasilitasi Pengembangannya	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pengembangan <i>Center Of Excellence</i> Industri Alat Kesehatan	5.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Penguatan Rantai Pasokan Industri Dalam Negeri Menuju Substitusi Impor Produk IKFT	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Peralatan Fasilitas Laboratorium Pengujian untuk Menunjang SNI Wajib BSKJI	10.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rancangan SNI, ST dan/ atau PTC	5.764,4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki	11.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sertifikasi Produk	20.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.5 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Penyelarasan Regulasi/ Kebijakan</b>		
<i>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</i> di Bidang Industri Manufaktur	1.500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / <i>Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP)</i> oleh Daerah (Dekonsentrasi)	3.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / <i>Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP)</i> yang Diterbitkan	7.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Analisa dan Informasi Pasar Ekspor di Negara Tujuan Ekspor Utama/Potensial	2.609,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kebijakan Penurunan Hambatan Akses Pasar	14.080,3	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Kebijakan Sektor Jasa	1.060,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Kelembagaan Otoritas Nasional Senjata Kimia	1.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kajian Pemanfaatan Teknologi <i>Material Recovery End-of-life Tires</i>	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kebijakan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor	3.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Pendampingan Investasi Perusahaan Multinasional	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Penyusunan Neraca Komoditas Industri Kimia Hilir dan Farmasi	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rekomendasi Kebijakan Fiskal dan Nonfiskal Sektor Industri Tekstil, Kulit dan Alas kaki	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rekomendasi Kebijakan Teknis Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Indeks Persepsi Persaingan Usaha	700,0	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pendirian Pabrik untuk Peningkatan Fasilitas <i>Natural Extract</i> Alat Kesehatan Domestik		BUMN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pupuk NPK		BUMN
Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik Pusri-IIIB		BUMN
Pembangunan Pabrik <i>Amurea</i> Bintuni		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pabrik <i>Methanol</i> Bintuni	<b>5.028.830,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pabrik <i>Nitrobenzene</i> dan PAP di Cilacap		BUMN
Pengembangan Fasilitas Pemanfaatan <i>Side Product</i> Pabrik AIF3-II		BUMN
Pengembangan Pesawat N219 untuk Wilayah 3T		BUMN
Pengembangan Produk <i>Adjacent Chemical</i> Pabrik <i>Ammonium Nitrat</i>		BUMN
Hilirisasi Batu Bara menjadi Gas Batu Bara DME		BUMN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.6 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>2) MP : Destinasi Pariwisata Prioritas <sup>2)</sup></b>	<b>36.226.064,4</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>4.098.484,4</b>	
<b>Sub:</b> DPP Danau Toba dan Sekitarnya; DPP Borobudur dan Sekitarnya; DPP Lombok-Mandalika; DPP Labuan Bajo; DPP Manado-Likupang; DPP Wakatobi; DPP Raja Ampat; DPP Bromo-Tengger-Semeru; DPP Bangka Belitung; DPP Morotai		
<b>Aspek:</b> <i>Perintisan Destinasi</i>		
Warisan Geologi yang Ditetapkan	2.105,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Prasarana Wisata Bahari	10.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	1.530,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	18.150,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> yang Dikembangkan	10.070,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	3.700,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas Regional II yang Dikembangkan	4.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Ruang Kreatif untuk Pendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas	4.650,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (5202 - Kab. Lombok Tengah)	13.860,5	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek:</b> <i>Pembangunan Jalan</i>		
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jln. Basuki Rakhmat (Madiun)	8.933,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan - Solo Jebres	109.829,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Peningkatan Jalur KA Lintas Kisaran - Rantau Prapat Tahap I (Kisaran - Mambangmuda)	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tanjung Pinggir - SBSN (Prioritas Nasional)	26.900,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Reaktivasi Jalur Kereta Api antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas Termasuk Supervisi	16.498,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (12 - Provinsi Sumatera Utara)	26.953,8	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.7 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	24.583,5	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (52 - Provinsi Nusa Tenggara Barat)	16.755,8	PEMDA (DAK FISIK)
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (3471 - Kota Yogyakarta) [DAK]	3.808,8	PEMDA (DAK FISIK)
Jalan - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (7171 - Kota Manado) [DAK]	4.432,6	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Pembangunan Bandara dan Pelabuhan</b>		
Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap II	15.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	58.087,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua Tahap II - SBSN	34.431,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN	48.006,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap III	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	64.639,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu Tahap II - SBSN	34.507,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap IV	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III	9.956,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Silalahi Tahap II	6.135,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Sippinggan Tahap III	35.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong - PN	28.042,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara Dewadaru - PN	50.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Sibisa - PN	61.360,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang	25.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perkuatan Dermaga Pelabuhan Wanci	68.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang (Prioritas Nasional)	39.326,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bandara Komodo Labuan Bajo (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	401.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN)	20.000,0	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.8 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Pembangunan Desa Wisata</b>		
Amenitas Wisata yang Dibangun/Dikembangkan	3.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata	46.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	6.600,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	1.600,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
SDM Pariwisata di Desa Wisata yang Difasilitasi Melalui Pendampingan	12.364,8	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pembangunan Amenitas</b>		
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	144.587,3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	8.850,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur	18.756,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Amenitas dan Aksesibilitas yang Dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Danau Toba	23.151,9	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Dukungan Kegiatan Pemasaran bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Subsektor Kuliner, Kriya dan Arsitektur	5.350,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan	27.387,3	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Publikasi Media Cetak dan Media Luar Ruang	18.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Publikasi Media Digital	47.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Publikasi Media Elektronik	48.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.9 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Publikasi Media Sosial dan <i>Owned Media</i>	51.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Ruang Kreatif yang Difasilitasi	20.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
SDM dan Industri Pariwisata yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAPL yang Ramah Anak	1.100,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Terintegrasi dengan PSN)
Warisan Budaya yang Dilindungi	17.774,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pusat Jajan Kuliner dan Cenderamata (PJKC)	17.500,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL))	2.964,3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (7407 - Kab. Wakatobi)	19.357,6	PEMDA (DAK FISIK)
Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (8207 - Kab. Pulau Morotai)	19.990,5	PEMDA (DAK FISIK)
Pariwisata - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (9171 - Kota Sorong)	21.162,2	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Pembangunan Kawasan dan Wilayah</b>		
<i>Investment Project Ready to Offer (IPRO)</i> pada Destinasi Pariwisata Prioritas	1.350,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata	1.625,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan <i>Geopark</i>	5.000,0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan	3.000,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita Borobudur	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita Danau Toba	2.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.10 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Potensial Investor yang Difasilitasi Badan Otorita Labuan Bajo Flores	1.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Produk Wisata dan Kegiatan ( <i>Events</i> ) di Kawasan Badan Otorita Labuan Bajo Flores yang Dipublikasikan	3.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP)	7.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Borobudur	150,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Bromo - Tengger - Semeru	450,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Toba	78.039,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Penataan Kawasan Destinasi Wisata Wakatobi	31.310,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengaman Pantai Kapota yang Dibangun	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengaman Pantai Morotai Utara yang Dibangun	45.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Pantai Waha yang Dibangun	20.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Pantai Weda yang Dibangun	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Banjir DAS Serang yang Dibangun	102.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Banjir Muara Sungai Bogowonto yang Dibangun	279.709,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Banjir Sungai Binanga Aron, Aek Tulas dan Sungai Harian yang Dibangun	78.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya yang Dibangun	140.882,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	700,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.11 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (3471 - Kota Yogyakarta)	62.002,7	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Ruas Probolinggo Banyuwangi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Tol Serang Panimbang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Transportasi Darat untuk Mendukung 10 Wilayah Pariwisata Prioritas		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Marina Labuan Bajo		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pelabuhan Benoa (Pengembangan Bali <i>Maritime Tourism Hub</i> )		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan KEK Tanamori Labuan Bajo		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan Swasta/Badan Usaha</b>		
Pembangunan Hotel dan Restoran	Data belum tersedia	SWASTA
<b>3) MP : Kawasan Industri Prioritas dan Smelter <sup>2)</sup></b>	<b>29.516.716,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>6.962.826,3</b>	
<b>Sub:</b> KI Batang; KI Subang (Konsep Integrasi Kawasan Rebana); KI Teluk Weda; KI Teluk Bintuni; KEK/KI Palu; KEK/KI Sei Mengkei; KI Sadai; KEK/KI Galang Batang; KI Bintang Aerospace; KI Ketapang; KI Surya Borneo; 31 Smelter		
<b>Aspek:</b> Perencanaan, Perizinan dan Tata Ruang KI dan Smelter		
Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan	3.000,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi	5.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek:</b> Pembangunan Infrastruktur di Dalam KI dan Smelter		
Jalan Kawasan Industri Batang - Jalan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang	682.519,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jembatan Kawasan Industri Batang - Jembatan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang 1.3	26.237,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.12 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jembatan Kawasan Industri Batang - Jembatan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang 1.4	3.431,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja (PEN) - Kab. Batang	184.709,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Industri Besi Baja yang Terverifikasi Kemampuannya Dalam Rangka Pemenuhan Data <i>Supply Demand</i> Industri Baja Nasional	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek: Pengembangan Infrastruktur di Luar Kawasan Industri dan Smelter</b>		
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jalan Akses Pelabuhan Patimban	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Emergency Assistance Loan For Rehabilitation and Reconstruction</i> Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Patimban <i>Port Development Project Phase (I-2)</i>	621.079,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Fasilitas Pendukung pada <i>Back Up Area</i> Pelabuhan Patimban	89.993,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	200.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara Babo - PN	2.021,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Reaktivasi Jalur Kereta Api antara Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas Termasuk Supervisi	16.498,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu	142.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pelabuhan Patimban (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	2.287.143,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif (03 - Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) (9104 - Kab. Teluk Bintuni)	36.386,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan - Tematik Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif (8202 - Kab. Halmahera Tengah)	10.438,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor</b>		
<i>Business Development</i> berdasarkan Sektor	6.672,9	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-proyek Strategis di Wilayah Barat	2.500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-proyek Strategis di Wilayah Timur	3.125,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah II	1.879,5	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah III	1.374,3	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi Melalui Dana Dekonsentrasi	31.368,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV	1.873,5	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.13 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah I	1.128,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Forum Internasional Bekerja Sama dengan Media Internasional	5.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) Abu Dhabi	6.542,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) Beijing	3.974,5	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) London	8.904,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) New York	6.989,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) Seoul	8.531,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) Sydney	7.272,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
IIPC ( <i>Indonesian Investment Promotion Center</i> ) Tokyo	7.281,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Kemitraan Usaha Nasional	8.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi	4.100,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pemasaran Investasi Berdasarkan Sektor Pendukung Prioritas Nasional	9.026,1	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	47.600,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Bidang Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, dan Infrastruktur Penunjang Kawasan	8.500,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Promosi Penanaman Modal Dalam Forum Internasional ( <i>Davos</i> )	8.261,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Rekomendasi Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional	3.572,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Industri antara Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Dikembangkan	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Logam Yang Terfasilitasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) yang Dikembangkan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Harmonisasi Regulasi dan Lainnya</b>		
Formulasi Kebijakan Pengembangan Industri Mobil Listrik yang Berdaya Saing (PN)	851,0	KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan Hilirisasi Industri Logam Berbasis Pengolahan Sumber Daya Mineral Logam Bukan Besi	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kebijakan Pengembangan Kemampuan Industri Kedirgantaraan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral	2.701,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Perencanaan Smelter</b>		
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral	3.723,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.14 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>	
<b>Aspek: Pemantauan Pembangunan Smelter</b>			
Hasil <i>Monitoring</i> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	2.619,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang Termonitor dan Terevaluasi perkembangannya	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	
<b>Dukungan BUMN</b>			
Kawasan Industri Subang /Rebana <i>Technopolis</i> Subang	<b>22.553.890,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)	
KI Terpadu Subang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)	
Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Proyek Infrastruktur Dalam Kawasan		BUMN	
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)	
Pembangunan <i>Smelter Grade Alumina Refinery</i> (SGAR)		BUMN	
Pembangunan Smelter Pengolahan Tembaga dan <i>Anode Slime</i>		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)	
Pengembangan Industri <i>EV Battery</i> Terintegrasi		BUMN	
Pembangunan Smelter (RKEF) Pengelolaan Pemurnian Nikel & <i>Cobalt</i> (HPAL)		BUMN	
<b>Dukungan Swasta/Badan Usaha</b>			
Pembangunan PLTBs/EBT oleh <i>Tenant</i>		Data belum tersedia	SWASTA
Pengembangan Power Plant oleh Pengelola Kawasan	SWASTA		
Pembangunan <i>Container</i> Terminal	SWASTA		
Pengembangan Pelabuhan Sadai	SWASTA		
Eksekusi Realisasi Investasi Proyek-Proyek Strategis di Wilayah Barat	SWASTA		
Investasi Industri <i>Ferro Chrome</i>	SWASTA		
Investasi Industri Kaca	SWASTA		
Investasi Industri <i>Stainless Steel</i>	SWASTA		
Investasi 31 Smelter Prioritas	SWASTA		
<b>4) MP : Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan</b>	<b>1.185.642,4</b>		
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>959.082,4</b>		
<b>Aspek: Fasilitasi Pengolahan</b>			
Nelayan yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya	3.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Subsektor Hortikultura	25.650,0	KEMENTERIAN PERTANIAN	
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Subsektor Tanaman Pangan	363.839,0	KEMENTERIAN PERTANIAN	
Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Mendukung Korporasi Petani	8.143,1	KEMENTERIAN PERTANIAN	
Sarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Mendukung Korporasi Petani	12.071,5	KEMENTERIAN PERTANIAN	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Mendukung Korporasi Petani	2.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.15 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Mitra KUKM Pertanian dan Perikanan</b>		
UKM yang Ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	6.294,6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>Aspek: Pembiayaan dan Asuransi Sektor Pertanian dan Perikanan</b>		
Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya	1.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dukungan Permodalan dan Penjaminan Bagi Koperasi	4.247,2	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi	1.651,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Asuransi Pertanian	150.970,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Asuransi Usaha Ternak	26.950,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani	10.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Bidang Tanah Nelayan yang Difasilitasi Sertifikatnya	1.125,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Aspek: Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/ Agro Maritim 4.0</b>		
Rekomendasi Bidang Lahan Pembudidaya Ikan yang akan Disertifikasi	500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi Perpipaan	15.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Buah dan Florikultura Mendukung Korporasi Petani	2.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Korporasi Perbenihan	22.984,2	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Korporasi Sereal	20.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung Korporasi Petani	2.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Mendukung Korporasi Petani	14.708,3	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Ubi Kayu	11.125,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Model Pertanian Modern	3.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimasi Lahan	204.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Perbengkelan Alsintan	10.800,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Perbenihan Hortikultura Mendukung Korporasi Petani	1.200,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Perlindungan Hortikultura Mendukung Korporasi Petani	1.200,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Teknologi Mekanisasi Pertanian	4.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan</b>		
Kelembagaan Usaha Nelayan yang Dikembangkan Sebagai Korporasi Nelayan	10.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Dikembangkan Sebagai Korporasi Pembudidaya	800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya	1.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Korporatisasi Petani dan Nelayan Melalui Koperasi	1.787,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Koperasi di Kalangan Kelompok Strategis	4.500,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dikembangkan	1.500,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Lembaga yang Tereduksi Akses Pembiayaan, Investasi, Jaringan Pemasaran, dan Ekspor	8.285,0	KEMENTERIAN PERTANIAN





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.16 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Dukungan BUMN</b>		
Digitalisasi Proses Kredit untuk Pelaku UMKM		BUMN
Pengembangan Ekosistem Pertanian Berbasis <i>Digital (Agriculture Ecosystem 4.0)</i>		BUMN
<i>Prototype Integrated Commodity Chain</i> Telur	<b>226.560,0</b>	BUMN
Pembentukan Korporasi Petani Memperkuat Rantai Pasok Padi-Beras		BUMN
Pengembangan Aplikasi Digital dan Kartu Tani Berjaya di Lampung		BUMN
Pengembangan Program Jaringan Rumah Pangan		BUMN
<b>5) MP : Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi <sup>2)</sup></b>	<b>4.075.814,4</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>143.944,4</b>	
<b>Aspek: Pembangunan PLT Air</b>		
PLTMH	25.200,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Monitoring</i> TKDN PLT Air	105,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Pembangunan PLT Surya</b>		
PLTS Atap K/L	1.000,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Monitoring</i> TKDN PLT Surya	100,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PLTS Atap	400,0	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap	43.939,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap K/L	300,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap K/L	1.500,0	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (Terintegrasi dengan PSN)
Layanan Prasarana Internal	1.000,0	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
<b>Aspek: Pembangunan PLT Bayu</b>		
<i>Monitoring</i> TKDN PLT Bayu	50,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Pengembangan Riset dan Inovasi</b>		
Peta Potensi EBT Dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa	3.750,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Pembangunan PLT Bioenergi</b>		
<i>Monitoring</i> TKDN Bidang Bioenergi	395,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.17 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Pembangunan Greenfuel</b>		
Volume <i>Biofuel</i> untuk Domestik	2.420,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<i>Pilot Plant</i> Industri IVO/ILO ( <i>Industrial Vegetable Oil/ Industrial Lauric Oil</i> ) yang Dibangun Sebagai Bahan Baku Industri <i>Greenfuel</i> /B100	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat	14.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Pembangunan RDF Plant</b>		
Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan	3.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Pembangunan PLT Panas Bumi</b>		
<i>Monitoring</i> TKDN Bidang Panas Bumi	500,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi</b>		
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	38.251,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Standar/Regulasi</b>		
Penurunan Intensitas Energi Final	3.647,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan Melalui Kebijakan Fiskal yang Efektif (PN)	700,0	KEMENTERIAN KEUANGAN
Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	486,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan <i>Green Refinery</i> RU III Plaju	<b>3.931.870,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pabrik Katalis Merah Putih		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Biomassa untuk Suplai PLTU Batubara		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPSA) Wilayah Layanan Barat DKI Jakarta		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>6) MP : Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng</b>	<b>333.206,8</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>		
<b>Aspek: Pembangunan Infrastruktur Kolam dan Saluran Irigasi Tambak</b>		
Infrastruktur Budidaya Udang Berkelanjutan yang Ditingkatkan	1.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Irigasi Perikanan yang Dikelola Secara Partisipatif (PITAP)	19.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Bone	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Lampung Selatan	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Lampung Timur	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Lombok Tengah	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.18 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Luwu	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Pinrang	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Takalar	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kluster Kawasan Tambak Udang dan Bandeng yang Dikembangkan - Kab. Tanggamus	70,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	111.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Daerah Irigasi Lematang yang Dibangun	96.064,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pengembangan Benih dan Induk Berkualitas Tinggi</b>		
Benih Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	2.390,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Benih Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	4.876,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang Disalurkan ke Masyarakat	26,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Calon Induk Unggul Udang yang Disalurkan ke Masyarakat	1.234,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya di UPT	20.300,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Aspek: Penguatan Perizinan dan Pemasaran</b>		
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	13.520,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Indonesia-EU CEPA	238,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<b>Dukungan BUMN</b>		
Peningkatan Tambak Perikanan Budidaya	<b>62.200,0</b>	BUMN
<b>7) MP : Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</b>	<b>489.525,2</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>489.525,2</b>	
<b>Aspek: Pembangunan Infrastruktur Pendukung (Jalan, Air, Listrik)</b>		
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1.804,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1.953,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	400.849,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan</b>		
Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah - Provinsi Maluku	74,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Kajian Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional yang Disusun	3.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang Ditingkatkan Fasilitasnya, Termasuk untuk Menunjang PNBP Perikanan Tangkap	17.245,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Kebijakan Perencanaan ( <i>Pra Feasibility Study</i> ) Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	3.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.19 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Penguatan Armada Kapal, Sistem Logistik dan Industri Pengolahan</b>		
Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Tersalurkan	10.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kapal Perikanan Bantuan yang Tersalurkan	37.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Aspek: Penguatan Data Stock Perikanan</b>		
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)	8.800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional	2.700,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>8) MP : Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) <sup>2)</sup></b>	<b>1.527.871,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.527.871,3</b>	
<b>Sub:</b> Kalimantan Tengah; Sumatera Utara; Sumatera Selatan; Nusa Tenggara Timur; Papua		
<b>Aspek: Geospasial</b>		
Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Arah Prioritas Nasional Hasil Bantuan Teknis di Pulau Kalimantan - Kab. Kapuas	1.750,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III - Kab. Kapuas	59,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III - Kab. Pulang Pisau	238,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT K4 PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Pulang Pisau	42,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori IV - Kab. Banyuasin	50,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rancangan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lainnya - Provinsi Nusa Tenggara Timur	700,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Kab. Belu	777,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT PTSL ASN Kategori 4 - Kab. Banyuasin	510,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Pusat	21,3	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PBT K4 PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Humbang Hasundutan	42,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT PTSL ASN Kategori I - Kab. Sumba Tengah	429,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori I - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.650,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori I - Provinsi Papua	3.379,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III - Provinsi Kalimantan Tengah	2.986,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III - Provinsi Sumatera Utara	1.792,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.20 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori IV - Provinsi Sumatera Selatan	2.539,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Rancangan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lainnya - Provinsi Kalimantan Tengah	600,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT PTSL ASN Kategori 1 - Kab. Sumba Tengah	570,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Humbang Hasundutan	1.049,2	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Kapuas	1.457,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Pulang Pisau	1.166,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Jembatan yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan - Kab. Kapuas	1.446,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Koridor Satwa yang Dikelola Dalam Mendukung <i>Food Estate</i> - Kota Jayapura	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Koridor Satwa yang Dikelola Dalam Mendukung <i>Food Estate</i> - Kota Palangkaraya	1.500,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Koridor Satwa yang Dikelola Dalam Mendukung <i>Food Estate</i> - Kota Palembang	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembangunan Dermaga Basirih dan Bapinang Tahap III Kabupaten Kotawaringin Timur	5.283,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Dermaga Lupak Dalam Kapuas Kuala Termasuk Supervisi	17.256,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Dermaga Sei Ijum Kabupaten Kotim Termasuk Supervisi	6.425,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Bahaur	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan) (6203 - Kab. Kapuas)	20.121,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Irigasi - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan [DAK] (6210 - Kab. Pulang Pisau)	8.226,4	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: On Farm</b>		
Bantuan Saran Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi yang Mendukung <i>Food Estate</i> - Kab. Kapuas	2.300,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Mendukung Ketahanan Pangan ( <i>Food Estate</i> ) - Kab. Kapuas	2.468,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Koordinasi PCLS	32.040,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Layanan Umum PCLS	63.101,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan PCLS	62.985,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Alat dan Mesin Pertanian <i>Food Estate</i>	100.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.21 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Strategi Kebijakan Perpajakan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program <i>Food Estate</i> (PN)	700,0	KEMENTERIAN KEUANGAN
Layanan Perencanaan dan Penganggaran PCLS	177,4	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Layanan Pemantauan dan Evaluasi PCLS	272,7	KEMENTERIAN PERTAHANAN
Areal Pengendalian OPT Mendukung <i>Food Estate</i>	7.541,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Benih Sumber Jagung Mendukung <i>Food Estate</i>	473,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Benih Sumber Padi Mendukung <i>Food Estate</i>	1.916,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Buah dan Florikultura Mendukung <i>Food Estate</i> – Pusat	5.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan <i>Food Estate</i>	600.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Jagung Mendukung <i>Food Estate</i>	30.650,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung <i>Food Estate</i> – Pusat	12.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Mendukung <i>Food Estate</i>	13.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perbenihan Hortikultura Mendukung <i>Food Estate</i> – Pusat	4.400,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perlindungan Hortikultura Mendukung <i>Food Estate</i> – Pusat	2.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Ternak Unggas dan Aneka Ternak	38.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan) (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	16.280,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan) (5316 - Kab. Sumba Tengah)	19.948,0	PEMDA (DAK FISIK)
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan) (6203 - Kab. Kapuas)	22.162,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Pertanian - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (02 - Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan) (9401 - Kab. Merauke)	17.845,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Off Farm</b>		
Pengembangan Koperasi di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Nusa Tenggara Timur	375,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Koperasi di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Sumatera Utara	375,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan - Pusat	9.424,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.22 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Wirausaha Industri Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Fasilitasi Mesin/Peralatan – Pusat	50.994,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Lumbung Pangan Masyarakat	5.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Mendukung <i>Food Estate</i> - Pusat	8.000,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Mendukung <i>Food Estate</i> - Kab. Humbang Hasundutan	1.462,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Mendukung <i>Food Estate</i> - Kab. Pulang Pisau	1.416,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Mendukung <i>Food Estate</i>	17.113,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perdagangan - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	50.000,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pengembangan <i>Food Estate</i> Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan (Sumut)	Data belum tersedia	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>9) MP : Pengelolaan Terpadu UMKM <sup>2)</sup></b>	<b>8.877.482,7</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>876.282,7</b>	
<b>Sub:</b> Aceh; Jawa Tengah; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Timur; Sulawesi Utara		
<b>Aspek:</b> <i>Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama</i>		
Jumlah Wirausaha yang Menerima Fasilitasi Konsultasi Bisnis - Provinsi Aceh	1.143,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Menerima Fasilitasi Konsultasi Bisnis - Provinsi Jawa Tengah	1.143,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Menerima Fasilitasi Konsultasi Bisnis - Provinsi Kalimantan Timur	1.143,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Menerima Fasilitasi Konsultasi Bisnis - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.143,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Menerima Fasilitasi Konsultasi Bisnis - Provinsi Sulawesi Utara	1.143,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i>	47.344,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Aceh	166,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Jawa Tengah	166,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Kalimantan Timur	166,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Nusa Tenggara Timur	166,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok - Provinsi Sulawesi Utara	166,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.23 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	9.424,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	7.700,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	12.974,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	5.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Desain dan Kemasan	2.004,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapat Fasilitas	4.276,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapat Fasilitas	13.464,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa	1.213,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Karanganyar	1.270,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Magelang	1.480,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Temanggung	1.134,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Kurasi dan Standardisasi Produk</b>		
Sosialisasi Kepada Penerap SNI	1.098,4	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
Sertifikat Halal Non-UMK	6.950,0	KEMENTERIAN AGAMA
Sertifikat Halal UMK	25.050,0	KEMENTERIAN AGAMA
Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Aceh	194,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Jawa Tengah	194,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Kalimantan Timur	194,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Nusa Tenggara Timur	194,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk - Provinsi Sulawesi Utara	194,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan - Kota Samarinda	995,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Usaha Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Terstandardisasi	5.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Fasilitas Pengembangan Merek	1.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitas Sertifikasi Produk Ekspor	3.250,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<b>Aspek: Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan</b>		
Kemitraan Usaha Nasional	8.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.24 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	27.000,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Adopsi Teknologi Digital UMKM	35.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang Diperkuat	2.590,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang Diperluas dan Dibentuk - Kab. Aceh Besar	124,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang Diperluas dan Dibentuk - Kab. Klaten	834,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang Diperluas dan Dibentuk - Kab. Minahasa Selatan	124,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang Diperluas dan Dibentuk - Kota Balikpapan	124,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang Diperluas dan Dibentuk - Kota Kupang	124,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kemitraan Usaha yang Diperluas dan Dibentuk	1.920,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Peningkatan Akses Pasar	5.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pengembangan Desain melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	4.500,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	2.830,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	10.300,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	307,1	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
<b>Aspek: Penyediaan Akses Pembiayaan</b>		
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha	3.884,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan - Provinsi Aceh	697,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan - Provinsi Jawa Tengah	697,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan - Provinsi Kalimantan Timur	697,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	697,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Akses Pembiayaan - Provinsi Sulawesi Utara	697,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Aceh	415,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Tengah	598,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Kalimantan Timur	415,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Nusa Tenggara Timur	415,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.25 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Utara	415,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan - Provinsi Aceh	570,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan - Provinsi Jawa Tengah	570,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan - Provinsi Kalimantan Timur	570,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	570,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Wirausaha yang Difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan - Provinsi Sulawesi Utara	570,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Modal Ventura	2.085,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Pasar Modal	1.785,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Perbankan Konvensional	2.710,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Perbankan Syariah	4.510,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi untuk Mendapatkan Akses Pembiayaan dari Teknologi Finansial	4.551,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<b>Aspek: Pendampingan SDM UMKM</b>		
Bimbingan Teknis Kepada UMKM	1.464,6	BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
Jumlah Wirausaha yang Didampingi Usahanya - Provinsi Aceh	2.271,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Didampingi Usahanya - Provinsi Jawa Tengah	2.271,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Didampingi Usahanya - Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.271,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Wirausaha yang Didampingi Usahanya - Provinsi Sulawesi Utara	2.271,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Aceh	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Jawa Tengah	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Kalimantan Timur	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Sulawesi Utara	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/ Start-Up yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Aceh	754,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/ Start-Up yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Jawa Tengah	754,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.26 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
UKM/ <i>Start-Up</i> yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Kalimantan Timur	754,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/ <i>Start-Up</i> yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Nusa Tenggara Timur	754,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/ <i>Start-Up</i> yang Dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis - Provinsi Sulawesi Utara	754,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Perempuan Rentan yang Dilatih Tentang Kewirausahaan - Provinsi Sulawesi Utara	331,0	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemuda yang Terfasilitasi Sebagai Kader Kewirausahaan	10.735,0	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	44.827,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	20.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	8.350,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>Export Coaching Program</i>	6.328,7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	10.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	2.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Fasilitasi <i>Esmart</i> IKM	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Fasilitasi <i>Esmart</i> IKM	1.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1.800,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dan Unit Pendampingan Langsung (UPL)) - Provinsi Aceh	1.258,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausahawan Muda Pertanian - Kab. Magelang	2.050,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (3322 - Kab. Semarang)	7.760,0	PEMDA (DAK FISIK)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (5315 - Kab. Manggarai Barat)	7.155,0	PEMDA (DAK FISIK)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (7106 - Kab. Minahasa Utara)	7.437,0	PEMDA (DAK FISIK)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (01 - Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah) (7172 - Kota Bitung)	7.849,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Regulasi dan Pendataan UMKM</b>		
Kebijakan Sarana dan Prasarana <i>Factory Sharing</i> UKM yang Direkomendasikan - Provinsi Aceh	704,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kebijakan Sarana dan Prasarana <i>Factory Sharing</i> UKM yang Direkomendasikan - Provinsi Jawa Tengah	704,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kebijakan Sarana dan Prasarana <i>Factory Sharing</i> UKM yang Direkomendasikan - Provinsi Kalimantan Timur	704,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kebijakan Sarana dan Prasarana <i>Factory Sharing</i> UKM yang Direkomendasikan - Provinsi Nusa Tenggara Timur	704,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.27 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Kebijakan Sarana dan Prasarana <i>Factory Sharing</i> UKM yang Direkomendasikan - Provinsi Sulawesi Utara	704,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	338.435,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Sektor Industri Aneka	4.633,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Dukungan BUMN</b>	<b>8.001.200,0</b>	
Penjaminan KUR UMKM – K		BUMN
<i>Telkom Digital Venture</i>		BUMN
Pengembangan Aplikasi Warung Pangan untuk UMKM		BUMN
<b>PN 2: MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN</b>		
<b>10) MP : Pembangunan Wilayah Batam-Bintan <sup>2)</sup></b>	<b>4.906.258,60</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>524.258,6</b>	
<b>Aspek: Infrastruktur Pendukung</b>		
Jalan Gajah Mada-Baloi Tanah Mas (Ruas Pura Agung-Jembatan Baloi Tanah Mas)	16.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar 1 Km	30.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan RE. Martadinata Tahap 1	35.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Jalan Yos Sudarso Tahap 1	20.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
<b>Aspek: Infrastruktur Strategis</b>		
Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar	110.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
<i>Container Yard (CY)</i> Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahap 2	36.971,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Pekerjaan <i>Multi Years</i> Pembangunan Terminal Kargo	40.577,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
<i>Revitalisasi Container Yard (CY)</i> Dermaga Selatan (Ex-SPIL)	31.930,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	70.000,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.28 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Kawasan Industri</b>		
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)	47.600,0	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Industri Smelter Logam Bukan Besi yang Termonitor dan Terevaluasi Perkembangannya	2.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi	5.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Industri (KI) yang Dikembangkan	2.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Kawasan Pariwisata</b>		
Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	3.700,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Bintan	400,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	6.600,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Jejaring Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang Dikembangkan	6.150,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SDM Pengelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.550,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<b>Aspek: Peralatan Kesehatan</b>		
Pengadaan Peralatan Penanganan <i>Cancer/ Radiotherapy</i> RSBP	57.281,0	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pengembangan Bandara Hang Nadim	<b>882.000,0</b>	BUMN
<b>Dukungan Swasta/Badan Usaha</b>		
PT Bintan Alumina Indonesia Smelter <i>Grade Alumina</i> (SGA)	3.500.000,0	SWASTA
<b>11) MP : Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar <sup>2)</sup></b>	<b>2.545.290,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>2.545.290,0</b>	
<b>Aspek: Ekonomi</b>		
Jalan Strategis (ProPN) - JLN. AHMAD YANI (BANJARBARU)	2.634,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Strategis (ProPN) - SP. HANDIL BAKTI (SP. SERAPAT) - KM 17 (BY PASS BANJARMASIN)	2.861,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - Jalan Baru Bts.Kota Singaraja - Mengwitani Titik 7a, 7b, 7c dan Titik 8	51.801,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) - BTS. KOTA SINGARAJA - MENGWITANI	19.768,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN) - JEMBATAN SHORTCUT DENPASAR - GILIMANUK (TK. YEH OTAN)	51.926,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Dermaga Bedugul Tabanan Tahap V	5.355,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.29 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Strategis (ProPN) (Padat Karya) - JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (MAKASSAR)	16.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) - JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (MAKASSAR)	3.208,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru) - Provinsi Sulawesi Selatan	256.785,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perkeretaapian Makassar - Parepare (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	330.398,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - BETUNG - BTS. KOTA PALEMBANG	39.589,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - BTS. KOTA PALEMBANG/BTS. KAB. BANYUASIN - T.J. API-API	40.149,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Strategis (ProPN) - BTS. KOTA PALEMBANG - SIMPANG INDRALAYA	17.182,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Preservasi Jalan Lintas Timur Provinsi Sumatera Selatan (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	458.200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU)
Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Alang-Alang Lebar (Prioritas Nasional) - Provinsi Sumatera Selatan	5.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Subsidi Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang	119.766,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional) - Pusat	500.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan ATCS/ITS (Prioritas Nasional)	47.117,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Subsidi Perintis KA Makassar - Parepare	51.968,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Lingkungan</b>		
PLTS Atap - Provinsi Kalimantan Selatan	1.345,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Bendungan Sidan yang Dibangun – Provinsi Bali	192.595,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap - Provinsi Sulawesi Selatan	1.726,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap - Provinsi Sumatera Selatan	1.657,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Pengendalian Banjir Sungai Lambidaro-Sekanak yang Dibangun - Provinsi Sumatera Selatan	100.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sanitasi (6371 – Kota Banjarmasin)	937,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Sosial</b>		
Pemugaran Permukiman Kumuh - Kota Palembang	6.345,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
PSU Perumahan Bagi MBR - Kota Palembang	421,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Kota Palembang	39.158,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemugaran Permukiman Kumuh – Kab. Banjar	11.002,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.30 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Barito Kuala	11.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Tanah Laut	14.827,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kota Makassar	1.040,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kota Palembang	12.980,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>12) MP : Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)</b>	<b>965.454,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>166.854,3</b>	
<b>Sub:</b> Penyiapan Regulasi dan Kebijakan		
<b>Aspek:</b> Regulasi dan Kebijakan Tata Ruang		
Dokumen Harmonisasi Raperaturan Perundangan RTR Calon IKN - Provinsi Kalimantan Timur	850,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota di Pulau Kalimantan - Provinsi Kalimantan Timur	326,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Materi Teknis dan RPP Revisi RTRWN - Pusat	1.275,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Materi Teknis RDTR Calon IKN - Provinsi Kalimantan Timur	1.350,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<b>Aspek:</b> Pemetaan dan Sertifikasi		
PBT K4 PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Kutai Kartanegara	2.554,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT K4 PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Penajam Paser Utara	241,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Kab. Kutai Kartanegara	250,1	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT Non Sistematis Kategori 3 - Kab. Penajam Paser Utara	26,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
PBT PTSL ASN Kategori III - Kab. Penajam Paser Utara	954,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Peta Zona Nilai Tanah (Hektar) - Provinsi Kalimantan Timur	666,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Kab. Kutai Kartanegara	183,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Kab. Penajam Paser Utara	19,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
SHAT PTSL ASN Kategori 3 - Kab. Penajam Paser Utara	1.399,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
<b>Sub:</b> Perencanaan dan Penyiapan Lahan		
<b>Aspek:</b> Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur		
Kajian Sistem Transportasi Ibukota Negara	10.127,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>Aspek:</b> Penyiapan lahan		
Area IKN yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	2.554,4	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	570,3	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	22.804,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.31 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Sub:</b> Pengembangan Kawasan dan SDM		
<b>Aspek:</b> Pembangunan Infrastruktur		
Bendungan Sepaku Semoi yang Dibangun - Provinsi Kalimantan Timur	105.261,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - SP. SAMBOJA KM 38 BPN (GEREJA) - LOA JANAN	770,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek:</b> SDM		
Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN - Kota Administrasi Jakarta Timur	5.500,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Penyusunan Instrumen Pemetaan / Penilaian Kompetensi ASN - Kota Administrasi Jakarta Timur	4.000,0	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Rekomendasi Penataan Kelembagaan IKN - Pusat	1.000,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
<b>Aspek:</b> Pengamanan		
Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN)	3.168,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi (BTS)		BUMN
Jaringan Interkoneksi (merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Kalimantan)		BUMN
Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi (merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Kalimantan)		BUMN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Utama Telekomunikasi (Akses, <i>Backbone</i> , <i>Core system</i> )		BUMN
<b>13) MP : Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong <sup>2)</sup></b>	<b>527.116,2</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>527.116,2</b>	
<b>Aspek:</b> Ekonomi		
<i>Be Creative District</i> (BCD) yang Dikembangkan - Pusat	370,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - SIMP. DODINGA - SOFIFI	16.964,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - SOFIFI - AKELAMO	8.428,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengembangan Bandar Udara Kuabang Kao - PN - Kab. Halmahera Utara	37.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	150.634,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN - Provinsi Papua Barat	48.006,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN - Kota Sorong	28.042,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jalan Strategis (ProPN) - BTS. BULUNGAN - TJ. SELOR	89.853,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Strategis (ProPN) - TJ. SELOR - SP. 3 TJ. PALAS	32.327,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Masterplan Smart City</i>	24.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pusat Pengembangan Keahlian / <i>Skill Development Center</i> (SDC) - Kota Sorong	70,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.32 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Lingkungan</b>		
PLTS Atap - Provinsi Maluku Utara	1.351,4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Pengaman Pantai Sofifi yang Dibangun - Provinsi Maluku Utara	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PLTS Atap - Provinsi Papua Barat	1.394,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
PLTS Atap - Provinsi Kalimantan Utara	1.427,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Sosial</b>		
PSU Perumahan Bagi MBR - Kab. Lebak	1.029,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Kota Tidore Kepulauan	9.508,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemugaran Permukiman Kumuh - Kota Sorong	25.723,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>14) MP : Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay 2)</b>	<b>1.528.130,8</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.528.130,8</b>	
<b>Sub: Pengembangan Kawasan</b>		
<b>Aspek: Infrastruktur Kawasan</b>		
Air Baku KEK Sorong yang Dibangun - Provinsi Papua Barat	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Produksi Komoditas</b>		
<i>Pilot Project</i> Sarana Pascapanen Komoditas Kelautan yang Disediakan di Daerah Khusus dalam Rangka Mendukung <i>Green Economy Growth</i> - Kab. Sorong	150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
<i>Pilot Project</i> Sarana Pascapanen Komoditas Pertanian yang Disediakan di Daerah Khusus dalam Rangka Mendukung <i>Green Economy Growth</i> - Kab. Jayawijaya	150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
<i>Pilot Project</i> Sarana Pascapanen Komoditas Pertanian yang Disediakan di Daerah Khusus dalam Rangka Mendukung <i>Green Economy Growth</i> - Kab. Manokwari Selatan	150,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kawasan Kakao - Kab. Manokwari Selatan	3.693,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kopi - Kab. Jayawijaya	2.760,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Kawasan Kopi - Kab. Tolikara	2.810,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Optimalisasi Reproduksi - Provinsi Papua Barat	1.351,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Raja Ampat	258,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Teluk Bintuni	258,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Teluk Wondama	258,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Kampung Terpadu</b>		
Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua	48.010,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Provinsi Papua Barat	32.467,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.33 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Industri</b>		
Fasilitasi Investor dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi melalui Dana Dekonsentrasi - Provinsi Papua Barat	1.158,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek: Pariwisata</b>		
Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas Regional II yang Dikembangkan	4.200,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Regional II yang Dikembangkan	1.600,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Terintegrasi dengan PSN)
Rencana Induk Pariwisata Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMP) - Kab. Raja Ampat	7.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<b>Sub: Infrastruktur Pendukung</b>		
<b>Aspek: Energi</b>		
PLTS Atap - Provinsi Papua Barat	1.394,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Infrastruktur Jalan</b>		
Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN) - JALAN PERBATASAN OKSIBIL - TOWE HITAM	90.734,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	50.543,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP. GORO - KP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA)	131.770,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP.3 MAMEH - WINDESI	71.288,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Mameh-Windesi (Werabur)	46.107,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TOWE HITAM - OKSIBIL	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	47.562,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN ELELIM - MAMBERAMO II	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MAWIN I CS	38.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN WERIANGGI - AMBUNI	33.100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Infrastruktur Bandar Udara</b>		
Pengembangan Bandar Udara Agandugume - PN	3.225,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Anggi - PN	10.955,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar udara DEO Sorong - PN	28.042,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.34 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Pengembangan Bandar Udara Rendani - PN - Kab. Manokwari	95.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN	107.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>Aspek: Infrastruktur Pelabuhan</b>		
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	58.087,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III - SBSN	48.006,6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat Tahap II - SBSN	64.639,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Sub: Pendidikan</b>		
<b>Aspek: Beasiswa Bagi OAP</b>		
Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) (Target untuk Provinsi Papua dan Papua Barat 5.353 orang dengan alokasi Rp84,165 M)	153.000,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Provinsi Papua	29.906,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Provinsi Papua Barat	11.922,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<b>Sub: Kesehatan</b>		
<b>Aspek: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>		
Monitoring dan Supervisi Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan di Papua dan Papua Barat	2.601,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan di Papua dan Papua Barat	5.075,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penemuan Kasus dan Surveilans Faktor Risiko Malaria Tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat	2.950,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Tenaga Medis</b>		
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat	6.955,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	800,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	3.503,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Imunisasi dan Vaksinasi COVID-19</b>		
Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi di Papua dan Papua Barat	2.830,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Papua dan Papua Barat	550,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Workshop Bidang Imunisasi di Papua dan Papua Barat	3.320,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Sub: Infrastruktur Dasar</b>		
<b>Aspek: Infrastruktur Permukiman</b>		
Rumah Khusus - Kab. Tambrauw	8.170,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI - Kab. Manokwari	13.498,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja - Kab. Jayawijaya	38.399,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja - Kab. Tambrauw	13.666,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.35 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>15) MP : Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda</b>	<b>10.063.016,5</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>787.016,5</b>	
<b>Aspek: Nonfisik</b>		
Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pemulihan Ekonomi Pascabencana - Pusat	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana - Pusat	669,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial - Pusat	11.981,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Provinsi Banten	266,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Provinsi Sulawesi Tengah	465,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana - Provinsi Nusa Tenggara Barat	266,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Kab. Lombok Barat	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Kab. Lombok Tengah	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Kab. Sumbawa	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Kab. Sumbawa Barat	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Kota Mataram	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
Pendamping Penanganan Korban dan Pengungsi - Provinsi Nusa Tenggara Barat	51,7	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPb)
<b>Aspek: Fisik</b>		
Pengamanan Pantai Kalianda yang Dibangun - Provinsi Lampung	232.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pascabencana - Kota Palu	242.388,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah - Provinsi Sulawesi Tengah	53.870,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<i>Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction</i> Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Wani - Pusat	100.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Rekonstruksi dan Rehabilitasi Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu	142.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	<b>9.276.000,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.36 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>16) MP : PKSN Kawasan Perbatasan Negara <sup>2)</sup></b>	<b>772.502,5</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>772.502,5</b>	
<b>Aspek: Simpul Utama Transportasi</b>		
Pembangunan Terminal Barang Internasional Motaain NTT Tahap IV (Termasuk Supervisi)	32.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - JALAN AKSES JEMBATAN HOLTEKAMP (SISI HOLTEKAMP)	24.950,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Terminal Barang Internasional Skouw	33.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Pembangunan Jalan Nunpo - Inbate (Haumeniana) - Napan	160.164,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Pembangunan Jalan Oenaek-Saenam-Nunpo (Haumeniana)	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - LINGKAR PULAU SEBATIK	38.503,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Bandar Udara Nunukan - PN - Kab. Nunukan	13.223,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pilot Project Jalan Strategis Desa yang Ditingkatkan di Kawasan Perbatasan	3.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) - JALAN TEMAJUK - ARUK	120.447,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - JEMBATAN SUNGAI SAMBAS BESAR	163.469,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Sambas	6.600,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan - BTS. SERAWAK - ARUK - SP. TANJUNG	2.085,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi)	43.971,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>		
Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non-SRG - Kab. Belu	5.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Belu	4.181,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Revitalisasi Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Koperasi - Provinsi Papua	3.000,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan/Revitalisasi Gudang Non-SRG - Kota Jayapura	5.000,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional Sesuai Standar - Kab. Merauke	1.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.37 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Inpres 1 Tahun 2021	6.000,0	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat - Kab. Sambas	4.181,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Lada - Kab. Sambas	2.625,0	KEMENTERIAN PERTANIAN
Industri Kecil dan Menengah - Tematik Penguatan DPP dan SIKM (6101 - Kab. Sambas)	8.835,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>17) MP : Manajemen Aset Lahan dalam Pernerdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) 2)</b>	<b>143.653,1</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>143.653,1</b>	
<b>Aspek: Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah</b>		
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Banten	57,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Jambi	57,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Jawa Barat	108,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Jawa Tengah	55,7	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Jawa Timur	62,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Sulawesi Tenggara	67,6	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Provinsi Sulawesi Utara	69,3	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan - Pusat	1.162,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Penyusunan Peta Bidang Tanah</b>		
PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 - Kab. Tanjung Jabung Barat	59,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Redistribusi Tanah Kategori 2 - Kab. Kolaka Timur	458,8	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Redistribusi Tanah Kategori 4 - Provinsi Bengkulu	295,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 - Provinsi Banten	441,5	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Redistribusi Tanah</b>		
SHAT Redistribusi Tanah - Kab. Konawe Selatan	27,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.38 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Jawa Barat	136,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Jawa Timur	95,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SHAT Redistribusi Tanah - Provinsi Sulawesi Utara	122,4	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SK Redistribusi Tanah Kategori II - Kab. Konawe Selatan	554,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SK Redistribusi Tanah Kategori II - Provinsi Sulawesi Utara	2.493,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SK Redistribusi Tanah Kategori V - Provinsi Jawa Barat	1.690,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
SK Redistribusi Tanah Kategori V - Provinsi Jawa Timur	1.192,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pemanfaatan dan Penggunaan Aset Tanah</b>		
Akses Reforma Agraria Kategori II - Kab. Kolaka Timur	709,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori V - Kab. Lebak	337,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Akses Reforma Agraria Kategori V - Kab. Malang	1.011,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Koordinasi Kelembagaan melalui GTRA</b>		
Data GTRA Provinsi - Provinsi Bali	1.045,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Banten	978,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Bengkulu	1.048,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jambi	969,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Barat	1.187,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Tengah	1.099,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Jawa Timur	1.315,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.39 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Tenggara	1.083,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Provinsi - Provinsi Sulawesi Utara	1.113,0	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
Data GTRA Pusat - Pusat	5.087,9	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha</b>		
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP - Kab. Buleleng	10.297,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya - Pusat	1.250,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Nelayan yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya - Pusat	3.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengurus, Pengelola, Penyuluh dan Pengawas Koperasi yang Diberikan Pelatihan - Provinsi Jawa Barat	1.559,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ekonomi - Provinsi Jawa Tengah	160,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Ekonomi - Provinsi Jawa Timur	160,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Dukungan Modal/Keuangan Mikro, Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna</b>		
Kampung Nelayan yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Kampung Nelayan Maju/Kalaju) - Kab. Malang	800,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jawa Barat	598,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Jagung - Pusat	53.450,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Padi - Provinsi Jawa Barat	1.460,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Kawasan Padi - Provinsi Jawa Timur	1.460,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan - Kab. Bengkulu Tengah	150,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat - Kab. Bengkulu Tengah	211,9	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Buleleng	1.495,0	KEMENTERIAN PERTANIAN (Terintegrasi dengan PSN)
Nelayan yang Difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya - Pusat	1.500,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (Terintegrasi dengan PSN)
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Jambi	183,4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) - Provinsi Sulawesi Tenggara	414,7	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.40 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<i><b>Aspek:</b> Pemasaran dan Interkoneksi dengan Dunia Usaha</i>		
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Tengah	2.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Timur	1.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Banten	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Bengkulu	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jambi	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Jawa Barat	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Tenggara	1.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan BUMDesa - Provinsi Sulawesi Utara	750,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Koperasi di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Jawa Barat	375,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Terintegrasi dengan PSN)
<b>PN 3: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING</b>		
<b>18) MP : Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting <sup>2)</sup></b>	<b>37.821.596,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>37.821.596,0</b>	
<i><b>Aspek:</b> Penguatan Sistem Pelayanan KIA</i>		
Formula Rekomendasi Kebijakan Tata Laksana Emergency Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi di Fasyankes	1.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rumah Sakit yang Diberikan Pembinaan dalam Implementasi Operasi <i>Sectio Caesaria</i> Darurat dalam Waktu Kurang atau Sama Dengan 30 Menit	1.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku Bagan MTBS	2.953,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penanganan Kasus Gangguan Tumbuh Kembang Balita Tingkat Rujukan	3.815,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi	11.352,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku KIA	18.679,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i><b>Aspek:</b> Kapasitas Pelayanan, Pencegahan dan Deteksi Dini</i>		
Pendampingan Tablet Tambah Darah Remaja Puteri	1.056,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis dalam Peningkatan Pelayanan KB Pascapersalinan	1.160,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.41 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
PIK Remaja dan BKR yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (Pro PN Provinsi DKI Jakarta)	1.228,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT	1.827,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kartu Catin Sehat	2.200,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Buku dan Media KIE terkait Pembinaan Gizi Masyarakat	2.384,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Implementasi Skrining Layak Hamil bagi PUS di Kab/Kota Lokus AKI AKB	3.020,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Orang yang Dilakukan Sosialisasi dan Advokasi Pekerja Perempuan	3.046,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Pedoman dan SDIDTK Kit	4.405,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Desa yang Mendapatkan Penanganan Konvergensi <i>Stunting</i>	5.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Tenaga Kesehatan, Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur yang Diorientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.051,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan di Papua dan Papua Barat	5.075,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> P2 Diare dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya di Provinsi	6.093,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pedoman KB dan Alat Bantu Konseling Pelaksanaan Pelayanan KB	6.250,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Anak Balita yang Mendapat Suplementasi Gizi Mikro	11.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan POPM Filariasis dan Kecacingan	14.131,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pertemuan Pelayanan Kespro dan KB	14.337,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	17.494,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kampanye Penyebarluasan Informasi Tablet Tambah Darah	21.800,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan	52.097,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
PIK Remaja dan BKR yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	63.771,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Ibu Hamil dan Balita yang Diberikan Edukasi Gizi Seimbang melalui Pemberian Makanan Tambahan Lokal	187.618,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Penguatan Kapasitas Sistem Kesehatan</b>		
Tenaga Kesehatan yang Dilatih Gizi Bencana	1.166,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan <i>Ante Natal Care</i>	1.193,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Dilatih/Diorientasi Teknis Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan Kegiatan Gizi Masyarakat	1.859,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	2.079,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak	2.932,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan <i>Ultrasonography</i> bagi Dokter di Puskesmas	3.140,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Orientasi bagi Pendamping Masyarakat dalam Pencegahan Anemia	3.295,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan dan <i>Refreshing</i> dalam Rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	4.057,3	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelatihan Konseling Menyusui	4.846,3	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.42 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Peningkatan Kapasitas dan Penerapan Komunikasi Antar Pribadi (KAP)	4.851,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Dilatih Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)	5.499,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Terorientasi Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	5.579,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendampingan RSUD oleh Organisasi Profesi dan RS Rujukan	5.847,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat <i>Stunting</i>	6.226,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Terlatih ANC Lengkap Ibu Hamil dan Neonatal Esensial	7.183,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Terlatih Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	10.439,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Pemeriksaan HB	11.988,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program yang Ditingkatkan Kapasitas terkait Pelayanan Kontrasepsi	14.704,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Dilatih Pemantauan Pertumbuhan Balita	15.620,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacangan	16.446,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Guru PAUD dan Kader Terlatih Pelayanan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita	18.809,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan yang Dilatih Pencegahan dan Tatalaksana Balita Gizi Buruk pada Balita	43.440,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tenaga Kesehatan Terlatih Pelayanan Pertumbuhan dan Perkembangan serta Manajemen Terpadu Balita Sakit	50.745,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan dan <i>Refreshing</i> dalam Rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	220.012,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	260.253,1	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Paket Penyediaan Vaksin Lainnya	692.411,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	1.542.312,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Keluarga Berencana (1901 - Kab. Bangka)	1.019,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1211 - Kab. Karo)	1.037,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1674 - Kota Lubuk Linggau)	1.039,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1404 - Kab. Pelalawan)	1.043,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1306 - Kab. Padang Pariaman)	1.045,2	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1606 - Kab. Musi Banyuasin)	1.048,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1109 - Kab. Pidie)	1.049,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1102 - Kab. Aceh Singkil)	1.054,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1613 - Kab. Musi Rawas Utara)	1.063,9	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1503 - Kab. Sarolangun)	1.075,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1407 - Kab. Rokan Hulu)	1.078,3	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.43 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1117 - Kab. Bener Meriah)	1.087,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1115 - Kab. Nagan Raya)	1.096,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1803 - Kab. Lampung Selatan)	1.117,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1473 - Kota Dumai)	1.124,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1410 - Kab. Kepulauan Meranti)	1.134,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1101 - Kab. Simeulue)	1.155,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1173 - Kota Langsa)	1.161,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1671 - Kota Palembang)	1.162,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	1.191,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1509 - Kab. Bungo)	1.192,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1106 - Kab. Aceh Tengah)	1.198,9	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1104 - Kab. Aceh Tenggara)	1.260,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1406 - Kab. Kampar)	1.261,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	1.269,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1271 - Kota Sibolga)	1.280,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1110 - Kab. Bireuen)	1.282,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1604 - Kab. Lahat)	1.286,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1804 - Kab. Lampung Timur)	1.313,2	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1312 - Kab. Pasaman Barat)	1.315,9	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1278 - Kota Gunungsitoli)	1.321,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1807 - Kab. Way Kanan)	1.333,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1108 - Kab. Aceh Besar)	1.360,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1371 - Kota Padang)	1.366,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1405 - Kab. Siak)	1.367,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1303 - Kab. Solok)	1.371,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1673 - Kota Pagar Alam)	1.372,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1871 - Kota Bandar Lampung)	1.376,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu)	1.394,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1805 - Kab. Lampung Tengah)	1.411,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1605 - Kab. Musi Rawas)	1.414,6	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.44 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Keluarga Berencana (1672 - Kota Prabumulih)	1.480,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1610 - Kab. Ogan Ilir)	1.507,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1311 - Kab. Dharmasraya)	1.531,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	1.532,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1309 - Kab. Pasaman)	1.573,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1305 - Kab. Tanah Datar)	1.584,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1307 - Kab. Agam)	1.606,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1801 - Kab. Lampung Barat)	1.607,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1373 - Kota Sawahlunto)	1.612,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1221 - Kab. Padang Lawas)	1.648,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1113 - Kab. Gayo Lues)	1.694,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1808 - Kab. Tulang Bawang)	1.696,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)	1.704,2	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1201 - Kab. Nias)	1.705,3	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1706 - Kab. Mukomuko)	1.710,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1174 - Kota Lhokseumawe)	1.754,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	1.778,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1708 - Kab. Kepahiang)	1.778,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	1.778,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1202 - Kab. Mandailing Natal)	1.789,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1213 - Kab. Langkat)	1.878,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1209 - Kab. Simalungun)	1.938,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1707 - Kab. Lebong)	2.014,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1219 - Kab. Batu Bara)	2.035,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1212 - Kab. Deli Serdang)	2.095,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1502 - Kab. Merangin)	2.113,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1703 - Kab. Bengkulu Utara)	2.121,1	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1505 - Kab. Muaro Jambi)	2.145,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1704 - Kab. Kaur)	2.199,7	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1408 - Kab. Bengkulu)	2.237,4	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1572 - Kota Sungai Penuh)	2.249,4	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.45 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1210 - Kab. Dairi)	2.297,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1471 - Kota Pekanbaru)	2.319,6	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	2.378,5	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1603 - Kab. Muara Enim)	2.574,0	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1611 - Kab. Empat Lawang)	2.653,9	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	2.745,9	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (1810 - Kab. Pringsewu)	3.355,8	PEMDA (DAK FISIK)
Keluarga Berencana (00 - Bukan Tematik DAK) (1504 - Kab. Batanghari)	3.552,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1571 - Kota Jambi)	1.008,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3276 - Kota Depok)	1.013,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1613 - Kab. Musi Rawas Utara)	1.018,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7207 - Kab. Buol)	1.032,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7409 - Kab. Buton Utara)	1.037,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3604 - Kab. Serang)	1.047,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5301 - Kab. Sumba Barat)	1.051,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1871 - Kota Bandar Lampung)	1.064,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6112 - Kab. Kubu Raya)	1.072,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1222 - Kab. Labuhanbatu Selatan)	1.076,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5271 - Kota Mataram)	1.093,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8102 - Kab. Maluku Tenggara)	1.100,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1223 - Kab. Labuhanbatu Utara)	1.116,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3210 - Kab. Majalengka)	1.138,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9431 - Kab. Mamberamo Tengah)	1.176,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6101 - Kab. Sambas)	1.176,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7503 - Kab. Pohuwato)	1.195,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1174 - Kota Lhokseumawe)	1.208,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6502 - Kab. Bulungan)	1.215,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8272 - Kota Tidore Kepulauan)	1.232,7	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.46 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9105 - Kab. Manokwari)	1.232,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1101 - Kab. Simeulue)	1.260,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1214 - Kab. Nias Selatan)	1.290,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9110 - Kab. Maybrat)	1.296,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6405 - Kab. Berau)	1.304,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1172 - Kota Sabang)	1.326,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1506 - Kab. Tanjung Jabung Timur)	1.328,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3373 - Kota Salatiga)	1.346,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3214 - Kab. Purwakarta)	1.351,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3278 - Kota Tasikmalaya)	1.351,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1311 - Kab. Dharmasraya)	1.355,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3310 - Kab. Klaten)	1.412,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3324 - Kab. Kendal)	1.417,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6372 - Kota Banjarbaru)	1.436,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5303 - Kab. Kupang)	1.454,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2105 - Kab. Kepulauan Anambas)	1.478,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1303 - Kab. Solok)	1.482,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3203 - Kab. Cianjur)	1.485,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3273 - Kota Bandung)	1.486,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8205 - Kab. Halmahera Utara)	1.492,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2171 - Kota Batam)	1.497,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3207 - Kab. Ciamis)	1.516,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5104 - Kab. Gianyar)	1.530,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7206 - Kab. Toli Toli)	1.571,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8171 - Kota Ambon)	1.582,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1810 - Kab. Pringsewu)	1.586,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3512 - Kab. Situbondo)	1.589,8	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.47 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1307 - Kab. Agam)	1.598,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7405 - Kab. Konawe Selatan)	1.607,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (64 - Provinsi Kalimantan Timur)	1.612,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7604 - Kab. Mamuju)	1.612,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1502 - Kab. Merangin)	1.628,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6303 - Kab. Banjar)	1.638,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3328 - Kab. Tegal)	1.638,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7406 - Kab. Bombana)	1.653,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3529 - Kab. Sumenep)	1.656,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7309 - Kab. Pangkajene dan Kepulauan)	1.674,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7601 - Kab. Majene)	1.681,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1703 - Kab. Bengkulu Utara)	1.721,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1302 - Kab. Pesisir Selatan)	1.723,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7307 - Kab. Sinjai)	1.736,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6106 - Kab. Ketapang)	1.739,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8271 - Kota Ternate)	1.739,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7104 - Kab. Kepulauan Talaud)	1.746,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7205 - Kab. Donggala)	1.759,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9471 - Kota Jayapura)	1.764,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3319 - Kab. Kudus)	1.806,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1111 - Kab. Aceh Utara)	1.816,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7312 - Kab. Soppeng)	1.817,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1612 - Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)	1.825,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3212 - Kab. Indramayu)	1.829,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6474 - Kota Bontang)	1.831,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6103 - Kab. Landak)	1.840,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1118 - Kab. Pidie Jaya)	1.842,7	PEMDA (DAK FISIK)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.48 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1301 - Kab. Kepulauan Mentawai)	1.849,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1709 - Kab. Bengkulu Tengah)	1.854,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3271 - Kota Bogor)	1.861,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3202 - Kab. Sukabumi)	1.877,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1312 - Kab. Pasaman Barat)	1.919,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3302 - Kab. Banyumas)	1.938,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3206 - Kab. Tasikmalaya)	1.958,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8103 - Kab. Maluku Tengah)	1.985,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1116 - Kab. Aceh Jaya)	1.999,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1110 - Kab. Bireuen)	2.008,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1671 - Kota Palembang)	2.017,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7316 - Kab. Enrekang)	2.020,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3315 - Kab. Grobogan)	2.023,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6311 - Kab. Balangan)	2.029,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3218 - Kab. Pangandaran)	2.039,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3317 - Kab. Rembang)	2.041,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3374 - Kota Semarang)	2.056,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6302 - Kab. Kotabaru)	2.065,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7304 - Kab. Jeneponto)	2.086,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3318 - Kab. Pati)	2.108,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3309 - Kab. Boyolali)	2.109,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1208 - Kab. Asahan)	2.116,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5320 - Kab. Sabu Raijua)	2.130,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7326 - Kab. Toraja Utara)	2.135,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1674 - Kota Lubuk Linggau)	2.147,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1971 - Kota Pangkal Pinang)	2.185,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1114 - Kab. Aceh Tamiang)	2.196,9	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.49 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1605 - Kab. Musi Rawas)	2.199,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3514 - Kab. Pasuruan)	2.208,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1276 - Kota Binjai)	2.216,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1505 - Kab. Muaro Jambi)	2.228,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9414 - Kab. Mappi)	2.246,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3571 - Kota Kediri)	2.345,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7111 - Kab. Bolaang Mongondow Timur)	2.350,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3517 - Kab. Jombang)	2.356,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7412 - Kab. Konawe Kepulauan)	2.379,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6310 - Kab. Tanah Bumbu)	2.397,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6107 - Kab. Sintang)	2.403,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6403 - Kab. Kutai Kartanegara)	2.430,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (33 - Provinsi Jawa Tengah)	2.459,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3211 - Kab. Sumedang)	2.460,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9109 - Kab. Tambrauw)	2.462,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1611 - Kab. Empat Lawang)	2.465,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6105 - Kab. Sanggau)	2.492,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7201 - Kab. Banggai Kepulauan)	2.493,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1108 - Kab. Aceh Besar)	2.517,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3303 - Kab. Purbalingga)	2.528,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3215 - Kab. Karawang)	2.539,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9403 - Kab. Jayapura)	2.548,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3506 - Kab. Kediri)	2.577,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1402 - Kab. Indragiri Hulu)	2.599,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3321 - Kab. Demak)	2.633,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6305 - Kab. Tapin)	2.640,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3403 - Kab. Gunungkidul)	2.643,5	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.50 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7302 - Kab. Bulukumba)	2.654,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6108 - Kab. Kapuas Hulu)	2.733,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7602 - Kab. Polewali Mandar)	2.738,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1102 - Kab. Aceh Singkil)	2.740,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1275 - Kota Medan)	2.757,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7606 - Kab. Mamuju Tengah)	2.764,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1373 - Kota Sawahlunto)	2.767,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3528 - Kab. Pamekasan)	2.769,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1403 - Kab. Indragiri Hilir)	2.772,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3574 - Kota Probolinggo)	2.820,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6104 - Kab. Mempawah)	2.850,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1203 - Kab. Tapanuli Selatan)	2.858,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7471 - Kota Kendari)	2.859,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1173 - Kota Langsa)	2.987,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6401 - Kab. Paser)	3.006,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3527 - Kab. Sampang)	3.026,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5206 - Kab. Bima)	3.069,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3508 - Kab. Lumajang)	3.117,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3674 - Kota Tangerang Selatan)	3.134,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3327 - Kab. Pematang)	3.134,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1602 - Kab. Ogan Komering Ilir)	3.191,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7173 - Kota Tomohon)	3.219,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6307 - Kab. Hulu Sungai Tengah)	3.221,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6207 - Kab. Lamandau)	3.231,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3301 - Kab. Cilacap)	3.295,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1701 - Kab. Bengkulu Selatan)	3.307,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7372 - Kota Parepare)	3.315,6	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.51 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3375 - Kota Pekalongan)	3.326,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3520 - Kab. Magetan)	3.335,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5304 - Kab. Timor Tengah Selatan)	3.358,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3601 - Kab. Pandeglang)	3.370,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5202 - Kab. Lombok Tengah)	3.390,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1211 - Kab. Karo)	3.439,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7505 - Kab. Gorontalo Utara)	3.464,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3523 - Kab. Tuban)	3.474,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7571 - Kota Gorontalo)	3.543,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3602 - Kab. Lebak)	3.552,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1103 - Kab. Aceh Selatan)	3.574,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1806 - Kab. Lampung Utara)	3.641,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3201 - Kab. Bogor)	3.657,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3329 - Kab. Brebes)	3.659,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3511 - Kab. Bondowoso)	3.661,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3217 - Kab. Bandung Barat)	3.683,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9427 - Kab. Supiori)	3.690,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7106 - Kab. Minahasa Utara)	3.711,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3402 - Kab. Bantul)	3.711,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1278 - Kota Gunungsitoli)	3.733,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3525 - Kab. Gresik)	3.742,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1212 - Kab. Deli Serdang)	3.795,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5318 - Kab. Nagekeo)	3.819,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3314 - Kab. Sragen)	3.821,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3522 - Kab. Bojonegoro)	3.865,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7101 - Kab. Bolaang Mongondow)	3.944,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7211 - Kab. Banggai Laut)	3.978,5	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.52 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5207 - Kab. Sumbawa Barat)	4.006,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7306 - Kab. Gowa)	4.043,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1704 - Kab. Kaur)	4.088,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (71 - Provinsi Sulawesi Utara)	4.094,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3316 - Kab. Blora)	4.098,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6402 - Kab. Kutai Barat)	4.106,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5311 - Kab. Ende)	4.112,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1609 - Kab. Ogan Komering Ulu Timur)	4.137,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3320 - Kab. Jepara)	4.171,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6172 - Kota Singkawang)	4.208,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (73 - Provinsi Sulawesi Selatan)	4.278,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1771 - Kota Bengkulu)	4.333,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7472 - Kota Bau Bau)	4.349,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7271 - Kota Palu)	4.398,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7103 - Kab. Kepulauan Sangihe)	4.454,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1309 - Kab. Pasaman)	4.502,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1507 - Kab. Tanjung Jabung Barat)	4.530,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5105 - Kab. Klungkung)	4.540,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5312 - Kab. Ngada)	4.599,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1802 - Kab. Tanggamus)	4.606,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1216 - Kab. Pakpak Bharat)	4.643,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9409 - Kab. Biak Numfor)	4.667,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3504 - Kab. Tulungagung)	4.697,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1310 - Kab. Solok Selatan)	4.724,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3510 - Kab. Banyuwangi)	4.824,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1673 - Kota Pagar Alam)	4.862,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1610 - Kab. Ogan Ilir)	4.877,7	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.53 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1803 - Kab. Lampung Selatan)	4.891,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5313 - Kab. Manggarai)	4.904,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3213 - Kab. Subang)	4.955,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3513 - Kab. Probolinggo)	4.993,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7102 - Kab. Minahasa)	5.011,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9426 - Kab. Waropen)	5.028,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1807 - Kab. Way Kanan)	5.082,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3205 - Kab. Garut)	5.176,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6471 - Kota Balikpapan)	5.187,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3507 - Kab. Malang)	5.188,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1221 - Kab. Padang Lawas)	5.191,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5302 - Kab. Sumba Timur)	5.262,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5201 - Kab. Lombok Barat)	5.350,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1215 - Kab. Humbang Hasundutan)	5.518,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1706 - Kab. Mukomuko)	5.524,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1224 - Kab. Nias Utara)	5.546,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3502 - Kab. Ponorogo)	5.619,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3372 - Kota Surakarta)	5.631,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3208 - Kab. Kuningan)	5.759,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8201 - Kab. Halmahera Barat)	5.821,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5203 - Kab. Lombok Timur)	5.895,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1808 - Kab. Tulang Bawang)	6.025,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6309 - Kab. Tabalong)	6.085,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1813 - Kab. Pesisir Barat)	6.129,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6404 - Kab. Kutai Timur)	6.324,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5371 - Kota Kupang)	6.430,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1901 - Kab. Bangka)	6.483,6	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.54 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3311 - Kab. Sukoharjo)	6.493,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3322 - Kab. Semarang)	6.555,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1374 - Kota Padang Panjang)	6.600,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3572 - Kota Blitar)	6.649,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3471 - Kota Yogyakarta)	6.663,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1106 - Kab. Aceh Tengah)	6.693,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3401 - Kab. Kulon Progo)	6.722,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (31 - Provinsi DKI Jakarta)	6.730,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1113 - Kab. Gayo Lues)	6.784,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6206 - Kab. Sukamara)	6.793,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3518 - Kab. Nganjuk)	6.827,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8172 - Kota Tual)	6.860,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7408 - Kab. Kolaka Utara)	6.930,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3305 - Kab. Kebumen)	6.995,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3505 - Kab. Blitar)	7.027,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1572 - Kota Sungai Penuh)	7.068,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3371 - Kota Magelang)	7.233,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7172 - Kota Bitung)	7.320,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3307 - Kab. Wonosobo)	7.344,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5101 - Kab. Jember)	7.379,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3308 - Kab. Magelang)	7.400,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7108 - Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro)	7.553,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1903 - Kab. Bangka Barat)	7.825,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3578 - Kota Surabaya)	7.833,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3519 - Kab. Madiun)	7.904,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7203 - Kab. Morowali)	7.964,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7171 - Kota Manado)	8.056,9	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.55 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1407 - Kab. Rokan Hulu)	8.105,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8204 - Kab. Halmahera Selatan)	8.112,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5321 - Kab. Malaka)	8.178,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7303 - Kab. Bantaeng)	8.204,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3503 - Kab. Trenggalek)	8.300,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9408 - Kab. Kepulauan Yapen)	8.488,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7402 - Kab. Muna)	8.503,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1204 - Kab. Tapanuli Tengah)	8.599,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7502 - Kab. Gorontalo)	8.694,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9106 - Kab. Sorong Selatan)	8.837,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1509 - Kab. Bungo)	8.850,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8207 - Kab. Pulau Morotai)	8.946,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7308 - Kab. Maros)	9.002,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7414 - Kab. Buton Tengah)	9.201,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7403 - Kab. Konawe)	9.475,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5309 - Kab. Flores Timur)	9.614,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1210 - Kab. Dairi)	9.666,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1219 - Kab. Batu Bara)	9.708,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1406 - Kab. Kampar)	9.882,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2103 - Kab. Natuna)	9.887,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7210 - Kab. Sigi)	9.953,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5307 - Kab. Alor)	10.039,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1501 - Kab. Kerinci)	10.051,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1175 - Kota Subulussalam)	10.104,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1308 - Kab. Lima Puluh Kota)	10.141,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2104 - Kab. Lingga)	10.177,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1306 - Kab. Padang Pariaman)	10.337,4	PEMDA (DAK FISIK)





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.56 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1107 - Kab. Aceh Barat)	10.721,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8106 - Kab. Seram Bagian Barat)	10.730,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5316 - Kab. Sumba Tengah)	10.748,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1801 - Kab. Lampung Barat)	10.782,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6204 - Kab. Barito Selatan)	10.787,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6102 - Kab. Bengkayang)	10.936,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3326 - Kab. Pekalongan)	10.969,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5205 - Kab. Dompu)	10.983,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7322 - Kab. Luwu Utara)	11.273,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1607 - Kab. Banyuasin)	11.327,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1209 - Kab. Simalungun)	11.380,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1702 - Kab. Rejang Lebong)	11.386,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6109 - Kab. Sekadau)	11.594,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1471 - Kota Pekanbaru)	11.608,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9108 - Kab. Raja Ampat)	11.759,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9417 - Kab. Pegunungan Bintang)	11.794,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1503 - Kab. Sarolangun)	11.818,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6304 - Kab. Barito Kuala)	11.873,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5305 - Kab. Timor Tengah Utara)	11.906,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7204 - Kab. Poso)	11.976,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7318 - Kab. Tana Toraja)	12.069,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6208 - Kab. Seruyan)	12.106,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1604 - Kab. Lahat)	12.418,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1408 - Kab. Bengkalis)	12.429,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1213 - Kab. Langkat)	12.469,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6409 - Kab. Penajam Paser Utara)	12.501,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9103 - Kab. Teluk Wondama)	12.539,3	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.57 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1508 - Kab. Tebo)	12.572,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7605 - Kab. Pasangkayu)	12.622,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8105 - Kab. Kepulauan Aru)	13.038,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5308 - Kab. Lembata)	13.228,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2172 - Kota Tanjung Pinang)	13.358,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3306 - Kab. Purworejo)	13.956,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1608 - Kab. Ogan Komering Ulu Selatan)	14.007,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1707 - Kab. Lebong)	14.097,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7373 - Kota Palopo)	14.114,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5319 - Kab. Manggarai Timur)	14.222,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7212 - Kab. Morowali Utara)	14.273,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1504 - Kab. Batanghari)	14.567,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3501 - Kab. Pacitan)	14.912,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5310 - Kab. Sikka)	15.157,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3521 - Kab. Ngawi)	15.160,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7208 - Kab. Parigi Moutong)	15.189,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8202 - Kab. Halmahera Tengah)	15.458,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6205 - Kab. Barito Utara)	15.467,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3312 - Kab. Wonogiri)	15.477,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7413 - Kab. Muna Barat)	15.540,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7109 - Kab. Minahasa Tenggara)	15.557,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3404 - Kab. Sleman)	16.150,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6271 - Kota Palangkaraya)	16.249,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3304 - Kab. Banjarnegara)	16.577,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6411 - Kab. Mahakam Ulu)	16.984,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3323 - Kab. Temanggung)	17.591,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7407 - Kab. Wakatobi)	17.756,7	PEMDA (DAK FISIK)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.58 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (2102 - Kab. Bintan)	17.893,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6210 - Kab. Pulang Pisau)	18.030,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6203 - Kab. Kapuas)	18.131,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (9436 - Kab. Deiyai)	18.158,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1603 - Kab. Muara Enim)	18.160,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7411 - Kab. Kolaka Timur)	18.544,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1904 - Kab. Bangka Tengah)	19.109,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7209 - Kab. Tojo Una Una)	19.443,1	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1804 - Kab. Lampung Timur)	19.568,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7310 - Kab. Barru)	20.724,4	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6301 - Kab. Tanah Laut)	20.989,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6209 - Kab. Katingan)	22.079,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7202 - Kab. Banggai)	22.188,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7105 - Kab. Minahasa Selatan)	22.613,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7325 - Kab. Luwu Timur)	23.410,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (6211 - Kab. Gunung Mas)	23.468,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7603 - Kab. Mamasa)	23.683,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1218 - Kab. Serdang Bedagai)	23.988,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (1805 - Kab. Lampung Tengah)	24.435,5	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7301 - Kab. Kepulauan Selayar)	24.447,2	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3313 - Kab. Karanganyar)	26.909,0	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (8206 - Kab. Halmahera Timur)	27.379,8	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7314 - Kab. Sidenreng Rappang)	32.162,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7311 - Kab. Bone)	34.190,7	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7313 - Kab. Wajo)	35.474,6	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7315 - Kab. Pinrang)	36.662,3	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (7305 - Kab. Takalar)	37.479,4	PEMDA (DAK FISIK)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.59 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (3524 - Kab. Lamongan)	37.642,9	PEMDA (DAK FISIK)
Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (5204 - Kab. Sumbawa)	60.577,8	PEMDA (DAK FISIK)
Kefarmasian (00 - Bukan Tematik DAK) (1409 - Kab. Rokan Hilir)	3.212,7	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Pemberdayaan Masyarakat (Intervensi Spesifik)</b>		
Revitalisasi Posyandu	1.850,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemberdayaan Kampung KB dalam Rangka Penurunan <i>Stunting</i>	28.752,7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Keluarga dengan Baduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK	44.596,9	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Nasional	58.682,8	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kampanye Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Provinsi dan Kab/kota	132.160,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
<b>Aspek: Kerangka Pelaksanaan</b>		
1. Kerangka Pelaksanaan Pembiayaan		
Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Jampersal	800.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Kerangka Pelaksanaan Kebijakan		
Pengembangan Kebijakan Nasional dalam Mendukung Upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	2.500,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pengembangan Kebijakan Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	4.090,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Rekomendasi Kebijakan Hasil Studi Kasus <i>Stunting</i> Provinsi	4.800,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
<b>Aspek: Penguatan Sarana-Prasarana</b>		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	553.001,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	799.464,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Pemberdayaan Masyarakat (Intervensi Sensitif)</b>		
Lembaga Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang Melaksanakan Program UKS	2.650,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kampanye Gemarikan yang Dilaksanakan oleh Daerah (Dekonsentrasi)	3.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SD yang Mendapatkan Pembinaan UKS	3.520,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMA yang Melaksanakan Program UKS	3.705,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
SMP yang Melaksanakan Program UKS	4.063,1	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Satuan PAUD yang Melaksanakan Program UKS	7.830,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	15.705,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	22.100,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Desa Pangan Aman	34.606,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.755.388,2	KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.60 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Penguatan Kapasitas Daerah</b>		
Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Pusat	1.000,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kab/Kota yang Difasilitasi dan Dibina Pelaksanaan GP2SP	1.989,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> TK provinsi	2.288,2	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Koordinasi dan Avokasi Pembinaan Gizi Masyarakat	2.446,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Fortifikasi	2.455,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	2.943,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Humas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Provinsi	4.200,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Provinsi/Kab/Kota yang Dilakukan Bimbingan Teknis dan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat serta Evaluasi Penurunan <i>Stunting</i>	7.654,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Pusat	13.165,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Kegiatan Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi	24.945,4	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Penyelenggaraan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Provinsi dan Kab/Kota	76.680,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Pelaksanaan Layanan Audit <i>Stunting</i> , Manajemen Kasus <i>Stunting</i> Kab/Kota, dan Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB di Faskes	92.948,1	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
<b>Aspek: Penguatan Data</b>		
Akta Kelahiran yang Diterbitkan	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akta Kematian yang Diterbitkan	1.030,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	1.041,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	1.745,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Pusat Pengendali Data <i>Stunting</i>	1.950,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
Formula Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian (PSPKKPK) dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB	2.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Audit <i>Maternal Perinatal Surveillance Response</i> (AMPSR) Tingkat Provinsi/Kab/Kota/Puskesmas	2.051,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Survei Morbiditas dan Mortalitas Diare sebagai <i>Baseline</i> Imunisasi Rotavirus	3.620,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Filariasis dan Kecacingan	5.408,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans Gizi yang Ditingkatkan Kualitasnya	13.150,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Data Kasus <i>Stunting</i> dan Keluarga Risiko <i>Stunting</i> yang Terverifikasi	25.400,0	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.61 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>19) MP : Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)</b>	<b>1.493.773,6</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.493.773,6</b>	
<b>Aspek: Pengembangan Prasarana</b>		
Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN)	575.736,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN) - Kota Bandung	167.721,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN) - Kota Bogor	59.682,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (SBSN) - Kota Depok	161.774,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Penyediaan Sarana</b>		
Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (PHLN)	519.346,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Bogor	9.514,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>20) MP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0</b>	<b>421.409,5</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>421.409,5</b>	
<b>Sub: Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi</b>		
<b>Aspek: Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik</b>		
SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	6.637,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi</b>		
Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	83.500,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi</b>		
Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	12.578,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Sub: Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0</b>		
<b>Aspek: Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0</b>		
SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	34.438,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Sub: Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK)</b>		
<b>Aspek: Reformasi Kelembagaan</b>		
Transformasi BLK Baru	260.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Peningkatan Kualitas Pelatihan</b>		
Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga	24.257,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.62 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>21) MP : Reformasi Sistem Perlindungan Sosial <sup>2)</sup></b>	<b>152.567.930,7</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L</b>	<b>152.567.930,7</b>	
<b>Sub:</b> Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi		
<b>Aspek:</b> Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan		
Pendampingan Desa	1.574.635,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Data Center Nasional	1.475.950,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	15.461,1	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	10.418,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<b>Aspek:</b> Pengelolaan Data		
Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesmas	12.917,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT	95.952,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<b>Aspek:</b> Sinkronisasi dan Integrasi Data untuk Penargetan Perlindungan Sosial		
Prasarana Pengelolaan Database dan Teknologi Informasi Kebencanaan	9.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Sistem Informasi yang Terintegrasi dalam Mendukung Desa Digital	10.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	338.435,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
<b>Sub:</b> Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial		
<b>Aspek:</b> Integrasi dan Perluasan Kepesertaan		
Instansi Pengguna Pegawai Non PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.500,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
<b>Aspek:</b> Integrasi Data Jaminan Sosial		
Pelayanan Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional	4.013,6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang Disalurkan	21.600,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS	46.464.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Sub:</b> Penguatan Bantuan Sosial		
<b>Aspek:</b> Perluasan Pilihan KPM dan Pengembangan Skema Penyaluran		
Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	20.934,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<b>Aspek:</b> Integrasi dan Transformasi Program Bantuan Sosial		
Mahasiswa Penerima KIP Kuliah	3.540,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa Penerima PIP Kuliah	36.874,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	73.676,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTKB Penerima KIP Kuliah	8.276,0	KEMENTERIAN AGAMA
Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	581.635,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MA Penerima PIP	320.372,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMAK Penerima PIP	2.078,0	KEMENTERIAN AGAMA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.63 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	300.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Konverter Kit BBM ke BGG untuk Petani Sasaran	250.500,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Penyediaan Elpiji 3 Kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	1.628,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	959,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah	8.792.717,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SD/Paket A yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.220.480,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMA/Paket C yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.186.951,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMK yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	1.538.519,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Siswa SMP/Paket B yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	2.726.483,0	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.755.388,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	19.481,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I (PEN)	16.798.577,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II (PEN)	15.927.794,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III (PEN)	12.393.629,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	18.011,0	KEMENTERIAN SOSIAL
KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan Sembako pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	83.658,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah Penerima PIP	10.569,2	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji Muadalah Penerima PIP	45.571,0	KEMENTERIAN AGAMA
Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah Terima PIP	69.399,8	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MI Penerima PIP	422.823,2	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	558.814,5	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMPTK Penerima PIP	2.431,0	KEMENTERIAN AGAMA
Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	8.300,0	KEMENTERIAN AGAMA
Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	50.600,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	103.800,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	108.000,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	153.600,0	KEMENTERIAN SOSIAL





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.64 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Penguatan Sistem Pendukung</b>		
Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui <i>Smart Village</i>	10.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	2.340,0	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jaringan Komunikasi Data	47.145,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Warga Masyarakat Dilokasi Rawan Bencana yang Difasilitasi Kampung Siaga Bencana	6.957,0	KEMENTERIAN SOSIAL
BTS/Lastmile Papua dan Papua Barat	4.856.979,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial	11.981,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Logistik Tanggap Darurat	100.547,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<b>Aspek: Penguatan Integrasi Pelaksanaan melalui Layanan dan Rujukan Terpadu</b>		
Sumber Daya Manusia yang Dikelola	1.522.315,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Ditugaskan dalam Penanganan Bencana	13.807,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Tagana yang Mendapatkan Kelengkapan Siaga Bencana	87.212,0	KEMENTERIAN SOSIAL
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Diberdayakan	55.564,3	KEMENTERIAN SOSIAL
Pendamping Sosial PKH yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS REG I-VI	48.600,0	KEMENTERIAN SOSIAL
<b>22) MP : Reformasi Sistem Kesehatan Nasional <sup>2)</sup></b>	<b>32.716.579,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L</b>	<b>23.213.079,0</b>	
<b>Aspek: Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan</b>		
Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	30.400,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dokter pada DTPK dan Daerah Bermasalah Kesehatan	99.952,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat	6.955,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	148.402,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	51.239,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan bagi Dokter Keluarga di Puskesmas	4.275,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Investigasi Wabah/KLB dengan Pendekatan <i>One Health</i>	2.636,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Konseling Upaya Berhenti Merokok	2.581,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Laboratorium <i>Tuberculosis</i> dan Implementasi Penggunaan Tes Cepat Molekuler	1.294,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular	4.494,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	6.036,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Pengawasan Peningkatan Lingkungan Sehat	1.812,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	15.573,2	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.65 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara <i>Team</i>	16.743,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan SDM Pencegahan dan Pengendalian Filariasis, Kecacingan, dan <i>Schistosomiasis</i>	4.011,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi bagi Petugas Puskesmas	6.385,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit	2.079,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Vaksin COVID-19	1.015,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter <i>Pascainternsip</i>	6.229,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis	11.218,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat	800,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Surveilans	1.070,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pendidikan dan Pelatihan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	4.100,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat	3.502,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	44.989,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	38.897,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes yang Meningkatkan Status Akreditasinya	1.990,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	2.563,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Bidang Imunisasi	25.741,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Bidang Imunisasi di Papua dan Papua Barat	3.320,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Bidang Infeksi <i>Emerging</i>	1.149,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Pencegahan dan Pengendalian Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	7.174,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	107,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Petugas Imunisasi dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	3.908,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Petugas Imunisasi dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Papua dan Papua Barat	550,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Skrining dan Deteksi Dini pada Kelompok Berisiko untuk Pengendalian TBC dalam Pelaksanaan SPM TBC	107.987,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<i>Workshop</i> Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis di Kabupaten/Kota	2.000	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>		
Sarana Pelayanan Dasar yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	3.500,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Akreditasi, Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien, dan Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di FKTP	4.300,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien Pelayanan Kesehatan Dasar di FKTP (Dekonsentrasi)	3.836,1	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.66 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dengan Pendekatan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan Bergerak	140,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gugus Pulau	267,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peserta Peningkatan Kompetensi Dokter dalam Tata Laksana Kasus Rujukan Non Spesialistik di FKTP (Dekonsentrasi)	3.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek:</b> Peningkatan Kapasitas RS dan Yankes di DTPK		
Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari	274,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Akreditasi, Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien, dan Pengukuran Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan di RS	2.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik	150.295,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien Pelayanan Kesehatan di FKTRL (Dekonsentrasi)	3.400,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Gedung Pelayanan Katastrofik	75.147,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	674.285,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Obat-Obatan dan BMHP Pelayanan Katastrofik	225.443,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS (IsDB)	728,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengembangan Fasilitas Rujukan Kawasan Indonesia Timur	469.743,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas RS Proyek dalam Mendukung Sistem Rujukan Terpadu Nasional	5.047,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Proyek IsDB	711,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam Meningkatkan Sistem Rujukan (IsDB)	6.674,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis (IsDB)	2.245,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
RS Ponek yang Dilakukan Pembinaan	600,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN)	575.736,2	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Sarana Perguruan Tinggi yang Direvitalisasi (PHLN)	519.346,3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (Terintegrasi dengan PSN)
Angkutan Udara Perintis	422.332,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pemenuhan Rumah Sakit Polri (PN)	87.963,9	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan pada Penyakit Katastrofik dan Penyakit Khusus dan Penilaian Kinerja Faskes	1.750,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek:</b> Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan		
Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	11.610,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	86.410,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pengawas Obat dan Makanan yang Tersertifikasi Sesuai Standar	19.009,2	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.67 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20.139,3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	35.332,8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang <i>Real Time</i> , Dikembangkan dan Terintegrasi	26.447,6	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Hasil Pengembangan Alat dan Deteksi Kesehatan	5.000,0	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
Formula Rekomendasi kebijakan Distribusi Tren Epidemiologi terkait <i>Genom Host</i> dan <i>Pathogen</i>	30.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Formula Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Obat Baru atau Indikasi Baru	43.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri Alkes yang Didampingi dalam Pelaksanaan Riset dan Uji Klinik	3.607,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat sesuai Kebutuhan Dalam Negeri	4.557,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri Farmasi yang Dibina dalam Percepatan Produksi Vaksin COVID-19 Dalam Negeri	1.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Industri Vaksin yang Menerapkan Teknologi Produksi Vaksin COVID-19 Hasil <i>Transfer Knowledge</i>	500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Jejaring Laboratorium Pengujian Alat Kesehatan yang Melibatkan Universitas/Swasta	10.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan untuk Mendukung Ketersediaan Bahan Baku dan Obat Produksi Dalam Negeri	250,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Lembaga Pengembangan Vaksin Program Imunisasi Rutin (14 Antigen) dan Vaksin COVID-19 Produksi dalam Negeri yang Dibina	60.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembinaan Industri Farmasi dalam Pemenuhan Ketersediaan 40 Obat Esensial dalam JKN	600,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Promosi Pemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri	9.196,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Tersedianya Industri Alkes Dalam Negeri yang Memproduksi 10 Alkes Tertinggi <i>by Value</i> dan/atau <i>by Volume</i>	3.610,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Komersialisasi Bahan Aktif Obat Produksi Dalam Negeri	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 Sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Bahan Baku Obat	450,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kebijakan Kemandirian Alat Kesehatan	735,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan</b>		
Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	136.500,1	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Laboratorium BB/BPOM yang Meningkatkan Kapasitasnya untuk Memenuhi Standar <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i>	2.800,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sistem Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai dengan <i>Grand Design</i>	6.000,0	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Koordinasi Pengembangan Surveilans <i>Real Time</i> Penyakit Berbasis Laboratorium	1.475,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Kesehatan	9.750,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	30.869,7	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.68 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Kekarantinaan Kesehatan	108.779,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium	128.765,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Laboratorium	22.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penyelidikan Epidemiologi/Investigasi Penyakit Potensial KLB/wabah	6.035,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	26.464,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Potensial KLB/Wabah	5.601,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis	3.658,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Formula Kebijakan Penguatan Kapasitas Laboratorium untuk Mendukung Sistem Surveilans Penyakit <i>Emerging</i> dan <i>Re-emerging</i>	20.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	79.822,40	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	48.271,9	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi</b>		
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Malaria	10.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik	1.146,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit <i>Zoonosis</i>	523,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Alat dan Bahan Kesehatan Pendukung Imunisasi	25.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Assesment Peningkatan Kasus dan Eliminasi Malaria	1.258,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	24.301,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Percepatan Eliminasi Malaria	2.532,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian TBC	4.235,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Layanan Konseling Upaya Berhenti Merokok	2.873,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media KIE P2 TBC	4.250,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Media Komunikasi, Informasi, Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria	551,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring dan Supervisi Program P2 TBC	3.950,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Malaria	583,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Monitoring Evaluasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Papua dan Papua Barat	200,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan <i>Buffer</i> Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar	252.056,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB	213.175,5	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria	12.156,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabaikan	67.087,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Vaksin Baru	5.582,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Paket Penyediaan Vaksin COVID-19 (PEN)	10.000.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.69 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Paket Penyediaan Vaksin Imunisasi Rutin	1.542.312,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelaksanaan Imunisasi di Daerah Sulit	12.036,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan Pelaksanaan Program dan Pendampingan Kegiatan P2 Kusta dan Frambusia	1.604,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penemuan Kasus dan Surveilans Faktor Risiko Malaria Tingkat Provinsi	4.790,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penemuan Kasus dan Surveilans Faktor Risiko Malaria Tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat	2.950,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>	665,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Potensial KLB/Wabah	12.710,9	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penyelidikan Epidemiologi/Investigasi KLB/Wabah Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>	824,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sarana dan Prasarana serta Logistik dalam Pengendalian TBC	594.330,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Skrining dan Deteksi Dini pada Kelompok Berisiko Terinfeksi Kusta	21.328,4	KEMENTERIAN KESEHATAN
Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i> )	1.667,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Survei Darah Massal Malaria (Angka <i>Parasite Rate</i> ) di Daerah Sulit	948,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi <i>Emerging</i>	507,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans KIPI	2.327,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Surveilans KIPI di Papua dan Papua Barat	160,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemugaran Permukiman Kumuh	430.792,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pelayanan Kesehatan Hewan	31.603,7	KEMENTERIAN PERTANIAN
<b>Aspek: Inovasi Pembiayaan Kesehatan</b>		
Integrasi Tata Kelola Pembiayaan Kesehatan ( <i>Universal Health Care</i> ) antara Pemerintah dan Swasta	1.943,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penguatan Pembiayaan Kesehatan pada Kegiatan Promotif dan Preventif	5.707,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan	2.204,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Formula Rekomendasi Kebijakan Sinergisme Peran Pemerintah dan Swasta dalam Mendukung dan Memperkuat Pemerataan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia	5.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Aspek: Digitalisasi &amp; Pemberdayaan Masyarakat</b>		
Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan	262.510,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Masalah Kesehatan Prioritas	22.982,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pembudayaan Germas di Pesantren Sehat	16.125,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Penerapan <i>Telemedicine</i> di 250 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.607,2	KEMENTERIAN KESEHATAN
Peningkatan Kualitas Data Rutin Kesehatan	5.500,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	350,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Revitalisasi Posyandu	1.850,0	KEMENTERIAN KESEHATAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.70 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
RS yang Dilakukan Pembinaan dalam Penerapan Rekam Medik Elektronik (RME) Terintegrasi	2.158,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
OM Akses Internet	892.416,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	64.850,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan	307.340,6	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Dukungan BUMN</b>		
Peningkatan Kualitas Pelayanan RS <i> Holding</i> BUMN		BUMN
Proyek Pengembangan Vaksin COVID-19, Fasilitas Pengembangan Produk Skala Pilot dan <i>Biosimilar</i> ( <i>Trastuzumab</i> ), Proyek Fasilitas <i>Yeast-Based</i> (Produksi Bulk Hepatitis B, Insulin, HPV)		BUMN
Membangun Ekosistem Kesehatan melalui Sinergi <i> Holding</i> Farmasi dengan IHC	<b>9.503.500,0</b>	BUMN
Pengembangan Fasilitas RnD dan Produksi Untuk Vaksin non-EPI		BUMN
Pengembangan Vaksin COVID-19, termasuk Vaksin Merah Putih		BUMN
<i>Integrated Digital Health Care Super Apps</i>		BUMN
Budidaya Tanaman dan Pengembangan Fasilitas Ekstraksi, Fraksionasi, dan Isolasi Produk Herbal		BUMN
<b>PN 5: MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>23) MP : Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) <sup>2)</sup></b>	<b>1.080.911,6</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.080.911,6</b>	
<b>Aspek: Pembangunan Rumah Susun</b>		
Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	430.639,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja	465.563,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja (PEN)	184.710,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Revitalisasi Rumah Susun dan <i>Integrated Transportation Project</i>	Data belum tersedia	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>24) MP : Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) <sup>2)</sup></b>	<b>8.046.217,1</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>6.952.767,1</b>	
<b>Aspek: Pembinaan dan Pengawasan dalam Mendukung Pengembangan SPAM</b>		
Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	1.789,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.71 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Pengembangan Air Baku</b>		
Air Baku Banyuwangi yang Dibangun	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Air Baku Bendungan Gongseng yang Dibangun	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Karalloe yang Dibangun	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Lolak yang Dibangun	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Napunggete yang Dibangun	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Paselloreng yang Dibangun	80.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku Bendungan Tukul yang Dibangun	40.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Air Baku KEK Sorong yang Dibangun	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana Air Baku Embung Cikalong yang Dibangun	49.714,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana Air Baku Embung Sebayar yang Dibangun	35.417,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana Air Baku Jonggol dan Klapanunggal yang Dibangun	80.972,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana Air Baku Sistem Kesugihan yang Dibangun	44.102,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Prasarana Air Baku Tapin yang Dibangun	45.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota</b>		
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	799.464,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota	400.849,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	237.896,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota	125.978,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SPAM Bandar Lampung (Dukungan Konstruksi - Kementerian PUPR)	34.993,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Semarang Barat (Dukungan Konstruksi - Kementerian PUPR)	93.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Umbulan (Dukungan Konstruksi PUPR)	24.489,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Jatiluhur I ( <i>Unsolicited</i> ) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	560.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.72 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
SPAM Karian - Serpong (Sisi Hulu) ( <i>Unsolicited</i> ) (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	810.887,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
Air Minum (00 - Bukan Tematik DAK) (1601 - Kab. Ogan Komering Ulu)	9.085,0	PEMDA (DAK FISIK)
Air Minum (17 - Provinsi Bengkulu)	43.681,7	PEMDA (DAK FISIK)
Air Minum (63 - Provinsi Kalimantan Selatan)	24.847,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Pengembangan SPAM Regional</b>		
Pembangunan SPAM Regional	220.853,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Peningkatan SPAM Regional	12.444,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Dukungan BUMN</b>		
SPAM Regional Jatiluhur I	<b>1.093.450,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
SPAM Regional Karian Serpong		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>25) MP : Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) <sup>2)</sup></b>	<b>1.381.748,8</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.381.748,8</b>	
<b>Aspek: Kelembagaan</b>		
Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	243.170,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Setempat</b>		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	553.001,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota	2.100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sanitasi (00 - Bukan Tematik DAK) (1102 - Kab. Aceh Singkil)	5.528,1	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Terpusat</b>		
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	83.745,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	472.230,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	16.744,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>26) MP : Pemulihan 4 DAS Kritis</b>	<b>1.527.832,6</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.527.832,6</b>	
<b>Aspek: Pembangunan</b>		
Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung yang Dibangun	48.492,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian Banjir Sungai Cisdane yang Dibangun	10.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pompa Ancol Sentiong yang Dibangun	295.629,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sudetan Ciliwung-KBT yang Dibangun	60.700,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.73 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Pengendalian</b>		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	97.523,2	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	1.015.487,6	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<b>27) MP : 18 Waduk Multiguna</b>	<b>128.428,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>128.428,3</b>	
<b>Aspek: Konstruksi</b>		
Bendungan Mbay yang Dibangun	77.956,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pelosika <i>Multipurpose Dam Construction Project</i>	1.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Modernisasi Daerah Irigasi</b>		
Jaringan Irigasi SS Macan (SIMURP) yang Direhabilitasi	29.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pendukung SIMURP	500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Studi</b>		
<i>Matenggeng Multipurpose Dam Development Sub Project (ESP KOICA)</i>	19.572,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>28) MP : Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa</b>	<b>4.249.950,1</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>2.370.330,1</b>	
<b>Aspek: Enabler</b>		
Rekomendasi Geologi Hasil Pemantauan Penurunan Muka Tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta	436,9	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (PATGTL)	1.200,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Jalan Tol</b>		
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1A	271.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL SEMARANG - DEMAK 1B	917.484,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pengamanan Pantai</b>		
Pengaman Pantai Glayem yang Dibangun	100.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengaman Pantai Krangkeng yang Dibangun	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Pantai Dadap yang Dibangun	155.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pengamanan Pantai di Jakarta yang Dibangun	559.425,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- B.74 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Aspek: Pengendalian Banjir</b>		
Pengendalian Banjir Kali Bekasi yang Dibangun	128.926,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pengendalian Banjir Rob Semarang-Demak yang Dibangun	136.357,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sudetan <i>Floodway</i> Sedayu Lawas yang Ditingkatkan	40.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	<b>1.879.620,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>29) MP : Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu</b>	<b>15.646.741,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>3.222.211,3</b>	
<b>Sub:</b> Pelabuhan Belawan; Pelabuhan Kuala Tanjung; Pelabuhan Kijing; Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan Patimban; Pelabuhan Tanjung Perak; Pelabuhan Makassar; Pelabuhan Bitung; Pelabuhan Ambon Baru; Pelabuhan Sorong		
<b>Aspek: Standardisasi Pelabuhan</b>		
<i>Patimban Port Development Project Phase (I-2)</i>	621.079,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pelabuhan Patimban (I)	200.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Teknologi Informasi dan Komunikasi Prioritas Nasional	23.896,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pelabuhan Patimban (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	2.287.142,9	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Konektivitas Integrasi dengan Hinterland</b>		
Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) - Jalan Akses Pelabuhan Patimban	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Fasilitas Pendukung pada <i>Back Up Area</i> Pelabuhan Patimban	89.992,7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pengembangan Pelabuhan Belawan		BUMN
Pengembangan Pelabuhan Kijing		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pelabuhan Makassar		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Pelabuhan Ambon		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pengembangan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok		BUMN
Pembangunan <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
	<b>12.424.530,0</b>	



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.75 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>30) MP : Kereta Api Makassar-Parepare</b>	<b>761.255,7</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>761.255,7</b>	
<b>Aspek: Infrastruktur Kereta Api</b>		
Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Parepare Segmen 3 (Makassar - Barru)	256.785,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Perkeretaapian Makassar - Parepare (Konstruksi - Investasi BUP KPBU)	330.398,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(KPBU) (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pembiayaan Layanan Operasional</b>		
Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	122.104,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Subsidi Perintis KA Makassar - Parepare	51.968,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>31) MP : KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - Semarang dan Jakarta - Bandung)</b>	<b>25.003.200,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>5.200,0</b>	
<b>Aspek: Penyiapan</b>		
Pendampingan Pelaksanaan Perancangan Dasar Jalur Kereta Api Tambahan Jakarta - Surabaya	5.200,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>	<b>24.998.000,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan High Speed Railway Jakarta-Bandung		
<b>32) MP : Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung</b>	<b>40.000.500,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>500,0</b>	
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL BETUNG - JAMBI	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL JAMBI-RENGAT SEKSI 1	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL JAMBI-RENGAT SEKSI 2 DAN SEKSI 3	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - TOL TRANS SUMATRA (JTTS) - RENGAT - PEKANBARU	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - DEVELOPMENT OF NEW TUNNEL PAYAKUMBUH - PANGKALAN	100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Jalan Tol Ruas 1. Medan-Binjai 2. Bakauheni-T Besar 3. TBPPKA 4. Palembang-Indralaya 5. Pekanbaru-Dumai 6. Binjai-Langsa 7. Indralaya-Muara Enim 8. Kisaran-Indrapura 9. Kuala Tanjung-Parapat 10. Penanjung-Bengkulu 11. Sigli-Banda Aceh 12. Sicincin-Padang 13. Pangkalan-Pekanbaru	<b>40.000.000,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.76 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>33) MP : Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan <sup>2)</sup></b>	<b>630.291,4</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>630.291,4</b>	
<b>Aspek: Pembangunan Jalan</b>		
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Teluk Buton - Klarik	44.750,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	11.757,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pembangunan Jembatan</b>		
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - GALELA	20.340,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Jalan Teluk Buton - Klarik	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - Jembatan Loke Imroing, Cs (Tepa - Masbuar - Letwurung)	35.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI BULA AIR	29.007,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI NALBESSY II DAN WAI WAI NALBESSY III - JALAN TRANS PULAU BURU (NAMROLE - LEKSULA)	5.334,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI PULU	1.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan - JEMBATAN WAI TUNSA	1.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (Padat Karya) - GALELA	95,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Preservasi Jalan</b>		
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ADOKI - SAMBER (KP. BARU)	6.480,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BANGGOI - BULA	7.424,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BESI (KM. 50) - WAHAI	4.596,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA BAU BAU - PASAR WAJO - BANABUNGI	1.956,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA DARUBA - SANGOWO	14.060,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA RAHA - TONDASI	3.458,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.77 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - HAYA - TEHORU	1.312,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - ILWAKI - LURANG	3.518,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Jalan Lagadi - Lombe	30.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JLN. BASUKI RAHMAT (RAHA)	7.250,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - JLN. TRANS DARAME (DARUBA)	6.840,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LABUAN - MALIGANO	12.768,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LATU - LIANG	1.759,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - LIANG - SP. WAIPIA	7.368,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Lingkar P.Marsela	45.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - MAKO - MODANMOHE	2.900,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - MODANMOHE - NAMROLE	9.461,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SALEMAN - BESI (KM. 50)	17.437,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SINABANG - LASIKIN - INOR - NASREUHE	8.219,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. ETI - KAIRATU	4.254,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	14.921,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SP. WAIPIA - SALEMAN	2.931,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TANIWEL - SP. PELITA JAYA	4.507,2	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TANJUNG DATUK - TELUK BUTON	15.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.78 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TELUK BARA - AIR BUAYA	2.517,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TEPA - MASBUAR - LETWURUNG	85.254,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TOAPEJAT - ROKOT	31.086,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - BERE-BERE - SOFI	3.040,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Preservasi Jembatan</b>		
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - AIR BUAYA - SAMALAGI	1.705,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA BAU BAU - PASAR WAJO - BANABUNGI	2.910,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - BTS. KOTA DARUBA - SANGOWO	4.138,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - Provinsi Maluku	45.185,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	2.186,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SINABANG - LASIKIN - INOR - NASREUHE	4.625,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TAMILOW - HAYA	1.288,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - TEPA - MASBUAR - LETWURUNG	1.470,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - WAISELAN - LATU	3.888,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - AIR BUAYA - SAMALAGI	5.770,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	1.563,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - LIANG - SP. WAIPIA	5.447,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - PASAHARI - KOBISONTA	5.085,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - PIRU - SP. ETI	9.240,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.79 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - PIRU - WAISALA	1.080,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - SALEMAN - BESI (KM. 50)	2.542,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - SP. NAMLEA - MARLOSO	3.820,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - TAMILLOW - HAYA	7.529,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - TANIWEL - SALEMAN	4.904,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - TELUK BARA - AIR BUAYA	4.061,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - WAINGAPU - MELOLO	3.928,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (Padat Karya) - WAISELAN - LATU	13.280,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) - SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	10.170,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Terintegrasi dengan PSN)
<b>34) MP : Jalan Trans Papua Merauke - Sorong <sup>2)</sup></b>	<b>2.640.107,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>2.640.107,0</b>	
<b>Aspek: Pembangunan Jalan</b>		
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	60.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	50.543,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP. GORO - KP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA)	131.769,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN SP.3 MAMEH - WINDESI	71.288,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN WANGGAR-KWATISORE-KAMP. MURI (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	34.779,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KAMP. MURI - KWATISORE (BTS. PROVINSI PAPUA)	59.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Mameh-Windesi (Werabur)	46.107,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TOWE HITAM - OKSIBIL	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Pembangunan Jembatan</b>		
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN KAMPUNG MURI - KWATISORE (BATAS PROVINSI PAPUA)	93.250,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.80 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	47.561,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN AERY 1	7.450,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN AERY 2	14.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN AERY 3	12.950,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Jembatan Anak Nyum Cs	48.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN ELELIM - MAMBERAMO II	50.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KALI MUYU	7.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN KAO CS	50.300,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN LOG CS	38.600,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MAWIN I CS	38.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN MUM 1	10.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN TELAGA 1 CS	33.200,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN WERIANGGI - AMBUNI	33.100,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - JEMBATAN AERY 1	3.550,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - JEMBATAN AERY 2	2.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - JEMBATAN AERY 3	3.550,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Preservasi Jalan</b>		
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BEDUDIPA - BTS. KOTA NABIRE	5.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KOTA NABIRE - WANGGAR	33.926,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	43.006,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ENAROTALI - WAGETE	12.384,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Getentiri - Bts. Kab. Merauke/Kab. Boven Digoel	42.700,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN AKSES PELABUHAN YETETKUN II	100.154,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN IWUR - WAROPKO	58.749,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM I	45.165,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JALAN MAMBERAMO - ELELIM II	157.411,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KAMBUAYA - SUSUMUK	14.700,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.81 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KARUBAGA - ILU - MULIA	112.311,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN	12.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KUMURKEH - AYAMASI - SNOFY	91.703,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MARUNI - ORANSBARI	44.753,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MAYON - SIMPANG KAPIRAYA	59.694,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MINDIPTANA - TANAH MERAH	44.400,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MOANEMANI - BEDUDIPA	27.320,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - PRAFI - WARMARE - MARUNI	3.500,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SEREDALA - DEKAI	35.975,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SIMPANG PELRA - MAYON	27.459,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SNOFY - KEBAR - PRAFI	29.848,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TANAH MERAH - GENTENTIRI	39.900,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TIMIKA - SP. PELRA - POMAKO	42.091,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - USILIMO - KARUBAGA	95.646,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAGETE - MOANEMANI	9.364,4	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAMENA - HABEMA	2.906,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAROPKO - MINDIPTANA	8.031,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	147.411,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	2.074,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - MAYON - SIMPANG KAPIRAYA	13.210,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - PIRAMID - TIOM	2.748,1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - SEREDALA - DEKAI	4.024,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>Aspek: Preservasi Jembatan</b>		
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - BTS. KAB. SORONG SELATAN - KAMBUAYA	985,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	3.921,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - ENAROTALI - WAGETE	281,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - AIMAS (KM 23) - PEL. ARAR (SORONG)	199,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.82 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN SEREDALA-DEKAI 1	10.000,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - JEMBATAN SEREDALA-DEKAI 2	12.920,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - KLAMONO - BTS. KAB. SORONG SELATAN	850,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MARUNI - ORANSBARI	11.119,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - MINDIPTANA - TANAH MERAH	2.146,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua	36.043,9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - RANSIKI - MAMEH	15.365,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - SNOPI - KEBAR - PRAFI	13.592,5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - SIMPANG PELRA - MAYON	1.227,6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - TANAH MERAH - GENTENTIRI	5.195,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAGETE - MOANEMANI	4.516,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAROPKO - MINDIPTANA	1.800,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	144.699,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - Provinsi Papua	5.697,8	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - Provinsi Papua Barat	250,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - TIMIKA - SP. PELRA - POMAKO	922,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - WAMENA - HABEMA	77,3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) - WAMENA - HABEMA	78,7	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya) - ELELIM - PASVALEY - BTS. KOTA WAMENA	431,0	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>35) MP : Jembatan Udara 37 Rute di Papua</b>	<b>437.728,9</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>437.728,9</b>	
<b>Aspek: Aspek Layanan</b>		
Angkutan BBM untuk Kargo Perintis (MP)	5.650,5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Angkutan Kargo Perintis (MP)	66.764,8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Subsidi Operasi Angkutan Udara Kargo (MP)	12.115,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>Aspek: Aspek Pengembangan Infrastruktur</b>		
Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru - PN	105.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Agandugume - PN	3.225,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Kepi III - PN	100.500,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Mozes Kilangin - PN	25.665,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Sobaham - PN	10.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Tanah Merah - PN	1.808,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap III - PN	107.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.83 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>36) MP : Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar</b>	<b>4.079.132,1</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>2.396.132,1</b>	
<i>Aspek: Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan</i>		
Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek	25.881,3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan (Prioritas Nasional)	500.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)	50.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Subsidi Angkutan Penumpang ( <i>Buy The Service</i> ) Jabodetabek	57.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<i>Aspek: Sistem Angkutan Umum Massal Berbasis Rel</i>		
Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	72.940,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II	200,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Terintegrasi dengan PSN)
Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	1.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai s/d Jatinegara) (Tahap II)	445.918,4	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 1 Segmen Gedebage - Haurpugur	314.611,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur Ganda KA Kiaracandong - Cicalengka Tahap 2 Segmen Kiaracandong - Gedebage dan Haurpugur - Cicalengka	87.750,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai	320.448,2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Penertiban Lahan untuk Pembangunan Jalan KA antara Medan - Binjai	24.000,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakarta Kota	404.204,1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan Jalur KA Lintas Medan - Belawan Tahap I (Medan - Labuan)	92.079,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Surabaya Regional Railway Line (Phase I)	100,0	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pengembangan Transportasi Massal (Armada Bus) Perkotaan di 6 Kota Metropolitan	<b>1.683.000,0</b>	BUMN
Pembangunan LRT Jabodebek		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>37) MP : Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA</b>	<b>24.424.184,8</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>172.964,8</b>	
<i>Aspek: Jaringan Last Mile dan Sambungan Listrik</i>		
Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T	120.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Aspek: Kebijakan Digitalisasi dan Teknologi</i>		
Rekomendasi Pengendalian Pengembangan Smart Grid dan Pelaksanaan Kerja Sama Sektor Ketenagalistrikan	1.450,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.84 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Aspek: Pembangkit Listrik Terbarukan</b>		
PLTS Atap	43.939,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Kebijakan Tarif, Harga dan Subsidi</b>		
Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	959,5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Aspek: Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan</b>		
Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	222,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1.343,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1.803,6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1.952,7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	1.020,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari	274,2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
<i>Advance Metering Infrastructure (AMI)</i>		BUMN
Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penuntasan dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Kalimantan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Nusa Tenggara	<b>24.251.220,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Sulawesi		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk: <i>Backbone</i> Interkoneksi Sumatera		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<i>Co-firing</i> Pembangkit Batu Bara		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Pembangkit Listrik: Pembangkit Listrik Terbarukan Lainnya		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>38) MP : Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah</b>	<b>8.400.000,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>400.000,0</b>	
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	400.000,0	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.85 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan Jaringan Gas Kota: 1. DKI Jakarta 2. Tangerang 3. Bekasi 4. Karawang 5. Cirebon 6. Cilegon 7. Bogor 8. Semarang 9. Bojonegoro 10. Surabaya 11. Sidoarjo 12. Pasuruan 13. Medan 14. Dumai 15. Batam 16. Palembang 17. Lampung	<b>8.000.000,0</b>	BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
<b>39) MP : Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)</b>	(alokasi dibiayai oleh investasi badan usaha)	BADAN USAHA
<b>40) MP : Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak</b>	<b>72.270.777,1</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>537,1</b>	
Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	537,1	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Terintegrasi dengan PSN)
<b>Dukungan BUMN</b>		
Pembangunan <i>Grass Root Refinery</i> (GRR) Tuban		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP <i>Rescaling</i> RU II Dumai		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP <i>Rescaling</i> RU III Plaju		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP <i>Rescaling</i> RU IV Cilacap		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP <i>Rescaling</i> RU V Balikpapan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
RDMP <i>Rescaling</i> RU VI Balongan		BUMN (Terintegrasi dengan PSN)
Pembangunan Kilang Olefin		BUMN
<b>41) MP : Transformasi Digital</b>	<b>22.424.629,0</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>19.812.159,0</b>	
<b>Sub: Akses dan Infrastruktur</b>		
<b>Aspek: Penyediaan Akses Internet Cepat</b>		
Akses Internet Tetap Pitalebar	18.195,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BTS/ <i>Lastmile</i>	1.733.381,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BTS/ <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat	4.856.979,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kabupaten Kota yang Difasilitasi Menerapkan Infrastruktur Pasif Bersama	1.450,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.86 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Kebijakan untuk Peningkatan dan Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i>	7.400,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Telekomunikasi	6.942,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet	892.416,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	64.850,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS/ <i>Lastmile</i>	916.387,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM BTS/ <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat	1.093.905,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Palapa Ring	1.980.243,7	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OM Pusat <i>Monitoring</i> Telekomunikasi	51.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Kapasitas Satelit	1.873.006,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Terintegrasi dengan PSN)
Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Implementasi 5G	2.776,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>Aspek: Pengembangan Penyiaran Digital</b>		
<i>Digital Broadcasting System</i> (DBS)	1.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital	326.462,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dukungan Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital	204.852,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Publik Bidang Penyiaran	11.475,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lembaga Penyiaran yang Bertransformasi ke Penyiaran Digital	22.974,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pusat <i>Monitoring</i> Pos dan Penyiaran	22.892,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Pemerintah Regulasi/Kebijakan yang Terdampak dari UU Cipta Kerja Beserta Turunannya	10.049,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital	230.000,0	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
<b>Aspek: Frekuensi dan Perangkat TIK</b>		
Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi dan Pengendalian IMEI	2.226,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pembangunan Sistem <i>Monitoring</i> Frekuensi Radio (SMFR)	158.578,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penerimaan serta Penanganan Piutang dan Akuntabilitas PNPB BHP Frekrad dan SOR	1.927,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Infrastruktur SIMS	69.523,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung	197.760,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio untuk <i>Broadband</i>	13.811,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Digitalisasi Penyiaran	2.730,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.87 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Sub:</b> Layanan Pemerintahan		
<b>Aspek:</b> Pusat Data Nasional		
Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional	77.698,7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Data Center Nasional	1.475.949,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>Aspek:</b> Penerapan SPBE Terintegrasi		
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	2.950,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	3.300,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagai Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi)	1.050,0	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Prototipe <i>Cloud Services</i> SPBE	1.000,0	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
Penyelenggaraan Aplikasi <i>Cloud</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pengembangan, Operasional dan Pemeliharaan)	35.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Dukungan Teknologi Informasi pada SPPT-TI	2.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Portal Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.721,3	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
<b>Aspek:</b> Pelayanan Publik Berbasis Elektronik ( <i>E-Services</i> ) yang Terintegrasi		
Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran	3.250,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fasilitas Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penerapan PTSP Prima Berbasis Elektronik	2.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Data Pembangunan Daerah, Profil dan Analisis Daerah, e-Rakortek, Monev Bangda) yang Dikembangkan	1.000,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sistem Perizinan Pusat-Daerah yang Terintegrasi	6.000,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<i>Core Tax System (PN)</i>	408.756,3	KEMENTERIAN KEUANGAN
Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem (PN)</i>	1.012,6	KEMENTERIAN KEUANGAN
<i>Masterplan Smart City</i>	24.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Portal Pelayanan Publik	2.500,0	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
<b>Sub:</b> Pendidikan		
<b>Aspek:</b> Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		
Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno yang Dialihmediakan	3.194,8	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Platform <i>E-learning</i> Madrasah yang Dikelola	13.650,0	KEMENTERIAN AGAMA
Inisiatif Digital Sektor Strategis	63.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bahan Belajar Digital yang Dikembangkan	20.683,4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Model Media Pendidikan Digital yang Dikembangkan	2.262,5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Program Studi dengan Inovasi Pembelajaran Digital	2.896,8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
<i>E-Journal</i> yang Dilanggan	40.560,4	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.88 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Pojok Baca Digital di Daerah	25.000,0	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Kanal Pendidikan dan Budaya	6.170,0	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
<b>Sub:</b> Kesehatan		
<b>Aspek:</b> Sistem Informasi Kesehatan		
Penguatan Ekosistem Digital Kesehatan	39.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Sub:</b> Perdagangan, Perdesaan, Koperasi dan UMKM		
<b>Aspek:</b> Digitalisasi UMKM		
Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	3.287,9	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	2.339,5	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitas Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual	3.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual	4.500,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Sentra IKM dan UPT Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapat Fasilitas	4.276,2	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitas	5.630,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Sentra IKM dan UPT Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapat Fasilitas	13.464,1	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek:</b> Desa Digital		
Desa Digital yang Dikembangkan melalui Platform Akademi Desa 4.0	19.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Rekomendasi Pengembangan Desa Digital melalui Smart Village	10.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Sistem Informasi yang Terintegrasi dalam Mendukung Desa Digital	10.000,0	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
<b>Aspek:</b> Start-up Digital		
Startup Millennial	2.200,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Business Matchmaking Start-up Digital	37.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Digital Technopreneur	60.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Startup Digital yang Dikembangkan melalui Baparekraf for Start-up (BEKUP)	2.700,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<b>Aspek:</b> E-Commerce		
Layanan Publik Bidang Pos	2.160,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pendukung pada Pelaku Ekonomi Kreatif	12.340,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kebijakan Perdagangan Multilateral dalam E-Commerce	88,5	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Pelaku Usaha UMKM yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Perdagangan melalui Sistem Elektronik	651,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Rekomendasi Kebijakan Terkait Bidang Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik	789,0	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<b>Sub:</b> Digitalisasi Bantuan Sosial		
<b>Aspek:</b> Digitalisasi dan Integrasi Pelaksanaan Bantuan Sosial secara Bertahap		
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	15.461,1	KEMENTERIAN SOSIAL
Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako	20.933,9	KEMENTERIAN SOSIAL
Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	10.418,1	KEMENTERIAN SOSIAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.89 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<b>Sub:</b> Industri 4.0		
<b>Aspek:</b> <i>Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan</i>		
Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan <i>Making Indonesia 4.0</i> di Sektor Industri Kimia Hulu	1.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Aspek:</b> <i>Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital dan Insentif Investasi Teknologi</i>		
<i>Be Creative District (BCD)</i> yang Dikembangkan	981,2	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Lembaga/Komunitas/Asosiasi yang Mendapat Fasilitasi dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital	3.400,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Industri Sektor Elektronika yang Terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Otomotif yang Terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.500,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Industri Sektor Permesinan dan Alat Mesin Pertanian yang Terfasilitasi menuju Industri 4.0 melalui Pendampingan	6.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Memfasilitasi Implementasi Industri 4.0 Sektor Tekstil dan <i>Apparel</i>	6.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Rangka Penerapan <i>Making Indonesia 4.0</i>	4.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Kimia Hilir dan Farmasi	8.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Implementasi Industri 4.0 sektor Industri Semen Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	7.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Perusahaan di Sektor Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan yang Dilakukan Pendampingan Penerapan Industry 4.0	3.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Sub:</b> Literasi Digital Masyarakat		
<b>Aspek:</b> <i>Peningkatan Literasi Masyarakat</i>		
Literasi Digital	550.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>Sub:</b> SDM Digital Indonesia		
<b>Aspek:</b> <i>Peningkatan Kompetensi SDM pada Bidang TIK</i>		
Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	1.056,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika	46.389,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i>	241.970,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di BPPTIK	51.395,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Pusdiklat	28.827,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BBPSDMP Makassar	12.824,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BBPSDMP Medan	14.915,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.90 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Manado	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<i>Digital Talent Scholarship</i> di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta	9.112,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Makassar	432,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP Medan	420,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPPTIK	221,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Bandung	183,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Banjarmasin	333,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Jakarta	178,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Manado	382,8	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Surabaya	250,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BPSDMP Yogyakarta	152,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pelatihan	1.261,4	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
<b>Aspek: Kebijakan dan Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK</b>		
Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo	807,4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SDM Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Sertifikasi	6.000,0	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
<b>Aspek: Vokasi untuk Industri 4.0</b>		
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	19.400,0	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Transformasi BLK Baru	260.000,0	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN (Terintegrasi dengan PSN)
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	2.870,9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK	8.112,1	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Makassar	6.384,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBPSDMP Medan	6.525,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Bandung	5.210,3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Banjarmasin	4.600,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Jakarta	5.694,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Manado	3.493,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Surabaya	5.900,2	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BPSDMP Yogyakarta	6.000,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tenaga Kerja Industri 4.0	4.200,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.91 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Sub:</b> Keamanan Siber		
<b>Aspek:</b> Pembangunan Pertahanan Siber		
Siber	38.720,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
<b>Aspek:</b> Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber		
Pembentukan Tim Respons Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi	3.100,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang Teregistrasi	3.463,0	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<b>Aspek:</b> Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber		
Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA)	50.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerja Sama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Kerja Sama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber	1.443,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D	299,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
National Cyber Exercise Drill Test	2.458,4	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi	2.600,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif	65.487,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan dan Penerapan Data Protection Officer	3.164,5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE	909.047,6	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rancangan Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi	2.500,0	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHFI	148,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<b>Aspek:</b> Penyelesaian Kejahatan Siber		
Penanganan Tindak Pidana Siber	14.831,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<b>Dukungan BUMN</b>		
2nd Internet International Gateway (Wave Broadband)	<b>2.612.470,0</b>	BUMN
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Papua Utara (PATARA)		BUMN
Hyperscale Data Center		BUMN
National Data Exchange Platform (Satu Data)		BUMN
Digitalisasi SPBU		BUMN
Percepatan Pengembangan Digital PLN		BUMN
Program Digital Talent Incubator dan Digital Transformation Lab (ITDRI PEN)		BUMN
<b>PN 6: MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM</b>		
<b>42) MP : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3</b>	<b>87.614,8</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>87.614,8</b>	
<b>Sub:</b> Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes		
<b>Aspek:</b> Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis		
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	55.550,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Instalasi Pengolahan Limbah (Autoclave, Microwave, TPS, IPAL LB3, Insinerator, dan Cold Storage Limbah Medis Infeksius)	Data belum tersedia	PEMDA (DAK)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.92 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Aspek: Enablers</b>		
Kebijakan Analisa Dampak Program Kesehatan Lingkungan	3.000,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Konferensi dan <i>Event</i> Pelaksanaan Peningkatan Lingkungan Sehat	6.099,8	KEMENTERIAN KESEHATAN
Koordinasi Advokasi Program Kesehatan Lingkungan	7.895,3	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pelatihan Limbah Medis di Fasyankes	390,7	KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemantauan, Pendampingan, Fasilitasi Implementasi Kesehatan Lingkungan	907,0	KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialisasi dan Diseminasi Program Kesehatan Lingkungan	5.472,1	KEMENTERIAN KESEHATAN
<b>Sub: Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</b>		
<b>Aspek: Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu</b>		
Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan	3.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Wilayah Sumatera	4.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
<b>Aspek: Enablers</b>		
Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri	1.000,0	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
<b>Dukungan Swasta/Badan Usaha</b>		
Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Wilayah Jawa Timur	Data belum tersedia	SWASTA
<b>43) MP : Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana <sup>2)</sup></b>	<b>1.585.984,3</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>1.585.984,3</b>	
<b>Aspek: Penguatan EWS Bencana Hidrometeorologi</b>		
Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI)	3.960,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi Meteorologi Maritim ( <i>Strengthening of Marine Meteorology</i> )	185.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan <i>Scaling Up Weather Capacity II</i>	63.290,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin ( <i>Windshear</i> )	76.528,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
<b>Aspek: Penguatan EWS Bencana Lingkungan</b>		
Sistem Operasional Informasi Kualitas Udara	21.295,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	15.412,7	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	20.600,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	11.210,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Perawatan Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	6.300,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sarana Pengukuran dan Pengujian Senyawa <i>Dioxin Furan</i>	15.000,0	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.93 -

<b>Prioritas Nasional / Major Project</b>	<b>Alokasi (Rp Juta)</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (53 - Provinsi Nusa Tenggara Timur)	1.865,0	PEMDA (DAK FISIK)
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (6210 - Kab. Pulang Pisau)	2.600,0	PEMDA (DAK FISIK) (Terintegrasi dengan PSN)
Lingkungan Hidup - Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> dan Sentra Produksi Pangan (9412 - Kab. Mimika)	5.200,0	PEMDA (DAK FISIK)
<b>Aspek: Penguatan EWS, Bencana, Geofisika, Tsunami dan Gunung Api</b>		
Stasiun Ina-CORS yang Dibangun	29.849,1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun	28.522,2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Jaringan Komunikasi dan Informasi MKG	180.542,8	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami yang Berkualitas	102.388,9	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Layanan Informasi Kerentanan Seismik di Kota Besar	2.951,5	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan <i>Monitoring</i> Gempa Bumi dan Tsunami melalui Indonesia <i>Disaster Resilience Initiatives Project</i> (IDRIP)	87.370,9	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan Penguatan <i>Strengthening Climate and Weather Service Capacity Phase II (SIMM 2)</i>	160.000,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peralatan Seismograf untuk Informasi Gempa Bumi dan Tsunami	23.600,0	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	1.645,3	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pos Pengamatan Gunung Api yang Dikembangkan	7.840,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan	13.164,8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>Aspek: Penguatan Tata Kelola EWS Bencana</b>		
Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	3.600,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Berbasis Komunitas dan Keluarga	205.769,4	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Layanan Data dan Informasi	113.380,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Layanan Sistem Peringatan Dini	3.000,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Penguatan Desa Tangguh Bencana	4.500,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Rancang Bangun Sistem PB	2.200,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Satuan Pendidikan Aman dari Bencana (SPAB)	3.200,0	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
Penerapan Pengurangan Risiko Bencana dan Pandemi COVID-19	1.500,0	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Produksi Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional	3.805,5	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- B.94 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>		
<b>44) MP : Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</b>	<b>209.536,9</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>209.536,9</b>	
<i>Aspek: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber</i>		
Pembentukan Tim Respons Ancaman Intelijen Siber	3.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor IVN yang Teregistrasi	2.800,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang Teregistrasi	3.100,6	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang Teregistrasi	3.463,0	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<i>Aspek: Pembangunan Pertahanan Siber</i>		
Siber	38.720,0	KEMENTERIAN PERTAHANAN
<i>Aspek: Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerja Sama Internasional Bidang Siber</i>		
Penguatan Operasi Intelijen Siber	12.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kerja Sama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia	2.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Kerja Sama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber	1.443,1	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<i>Aspek: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber</i>		
Integrasi <i>Cyber Intelligent Analytics</i> (CIA)	50.000,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber	2.500,0	BADAN INTELIJEN NEGARA
Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber K/L/D	299,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Lulusan Program <i>Born to Defence</i> untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIKN	715,0	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
<i>National Cyber Exercise Drill Test</i>	2.458,4	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D	1.056,8	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Diklat Penanganan Perkara Siber	2.000,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC	66.000,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Peningkatan Kapasitas SDM Siber melalui Sertifikasi CEH dan CHF	148,5	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<i>Aspek: Penyelesaian Kejahatan Siber</i>		
Penanganan Perkara Siber	2.000,0	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Penanganan Tindak Pidana Siber	14.831,6	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
<b>45) MP : Penguatan Keamanan Laut di Natuna</b>	<b>87.288,5</b>	
<b>Dukungan Belanja K/L, KPBU dan DAK</b>	<b>87.288,5</b>	
<i>Aspek: Pembangunan</i>		
Sarpras Militer Pulau Strategis	55.288,5	KEMENTERIAN PERTAHANAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- B.95 -

Prioritas Nasional / Major Project	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Pelaksana
<b>Aspek: Pengadaan</b>		
Pengadaan <i>Unmanned Aerial Vehicle</i> (UAV)	32.000,0	BADAN KEAMANAN LAUT

**Catatan:**

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek (Belanja K/L, DAK, dan KPBU) dapat mendukung lebih dari 1 (satu) *Major Project*;
- 2) Tidak seluruh proyek pendukung MP ditampilkan;
- 3) Pada beberapa *Major Project* dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari BUMN/Swasta/Daerah, sehingga belanja K/L hanya sebagai fasilitator. Contoh: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung), Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
- 4) *Major Project* mencakup rincian Belanja K/L, Dana Transfer Khusus Fisik, KPBU, dan Badan Usaha (BUMN/Swasta);
- 5) Proyek DAK merupakan pagu alokasi DAK Fisik per subbidang per tematik per daerah berdasarkan Perpres Rincian APBN TA 2022;
- 6) Alokasi pendanaan/investasi KPBU bersifat indikatif;
- 7) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L, DAK Fisik, dan KPBU pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Yohana Silyanna Djaman